

BULETIN PEMBANGUNAN DAERAH

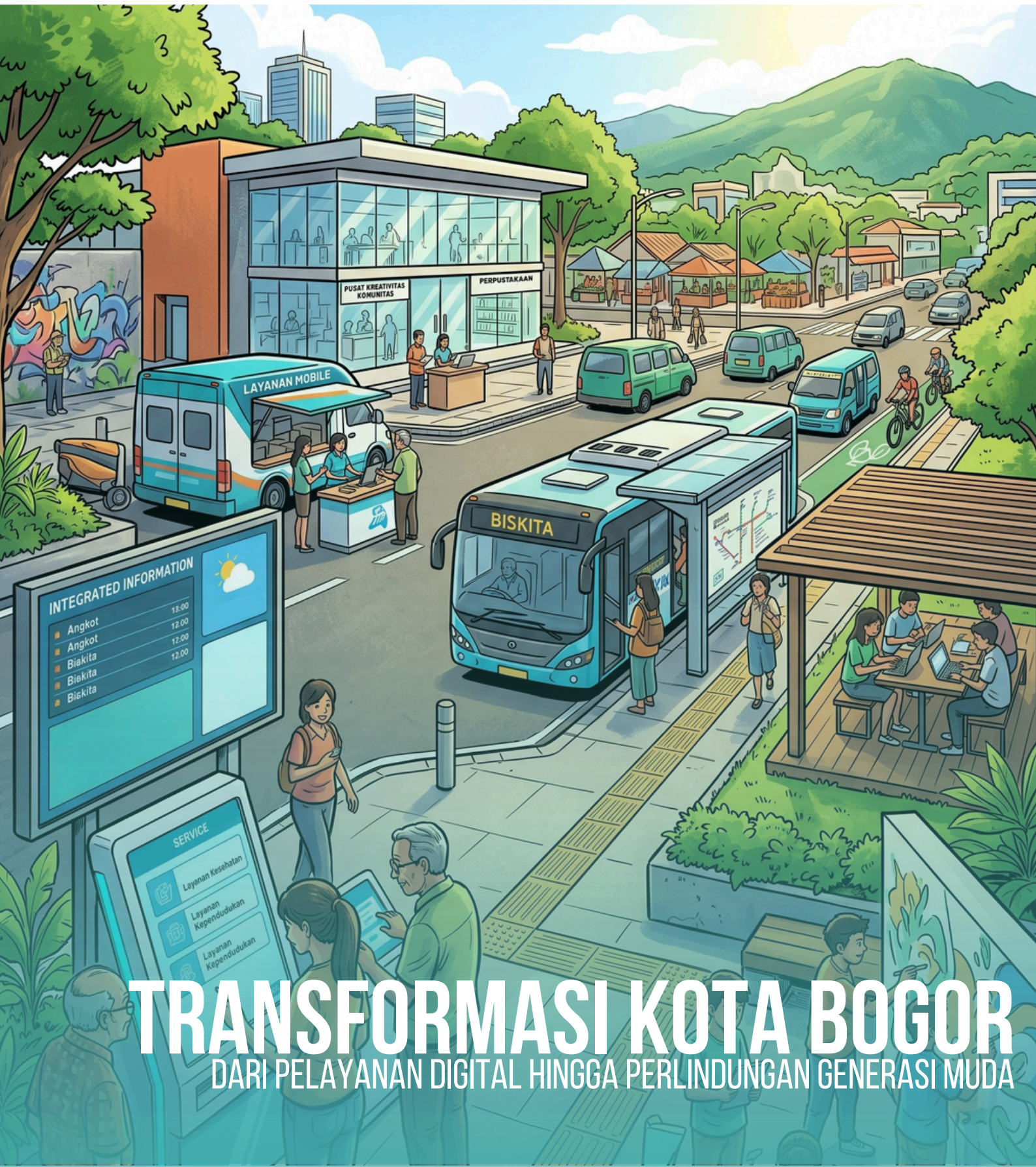
ISSN 2962-4045



Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Bogor

Vol.5 No.1

Januari - Maret 2026
www.bapperidakotabogor.go.id
Instagram : @bapperida.kotabogor



TRANSFORMASI KOTA BOGOR

DARI PELAYANAN DIGITAL HINGGA PERLINDUNGAN GENERASI MUDA



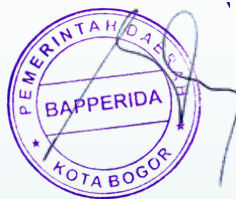
Kata Pengantar

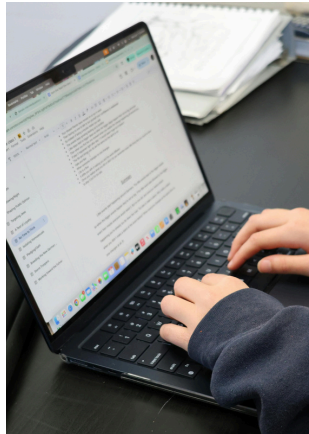
Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor bisa menyelesaikan penerbitan Buletin Pembangunan Daerah Vol.5 No.1. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Buletin Pembangunan Daerah ini merupakan edisi keempat yang diterbitkan sebagai sarana komunikasi dan publikasi informasi mengenai kegiatan pembangunan di Kota Bogor.

Akhirnya, kami mengharapkan semoga buletin ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor





Susunan Redaksi

PENGARAH

H. Denny Mulyadi, S.E.

PENANGGUNG JAWAB

Rudy Mashudi, S.T., MP

KETUA TIM REDAKSI

Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.SC.

TIM REDAKSI

Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si
Erni Solikhati, S.E.
Imam Santoso, S.E., M.M.
Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si.
Nani Haryani
Fajar Tri Utama
Rahma Meiza Hernanda

DESIGN

Syiva Multi Fani, S.Stat.

SEKRETARIAT

Dwi Hari Wibowo, S.Kom.

MITRA BESTARI

- Dr. Eko Sakapurnama (Universitas Indonesia)
- Dr. Eka Suhardi (Universitas Pakuan)
- Ifan Muttaqien, SP, MIT (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian)
- Mohamad Iksan Maolana, S.H., LL.M. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
- Sheila Savitri, S.Sos, M.AP (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)

<https://bapperida.kotabogor.go.id>



bapperida@kotabogor.go.id



[@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)

Daftar Isi

04

SIPASPROP SEBAGAI STRATEGI DIGITAL BERBASIS DATA UNTUK OPTIMALISASI PAD KOTA BOGOR

Astarine, S.STP, M.Si. – Bapenda Kota Bogor

07

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DARI SEKADAR KARTU MENUJU AKSES LAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Wardhani, S.P., M.P. – Disdukcapil Kota Bogor

16

PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN MENTAL REMAJA DALAM MENCEGAH DAN MENGHADAPI BULLYING

Andreanda Nasution SKM., M.Kes. dkk.
– Universitas Ibn Khaldun

24

KARTU KELUARGA SATU DOKUMEN, SEJUTA MANFAAT

Wardhani, S.P., M.P. – Disdukcapil Kota Bogor

30

KOTA BOGOR MENDUNIAKAN HALAL DAN ASUH (AMAN SEHAT UTUH DAN HALAL) : SI RUSA BUBULAK

Drh. Saptina Aryani, Setiawan AMd, dan tim
– DKPP Kota Bogor

33

LOKER BERES

Wardhani, S.P., M.P. dan Mugi Lastono, S.Sos.
– Disdukcapil Kota Bogor

42

PROGRESS REPORT MITRA PENDAMPING DINAS KESEHATAN

Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. – Bapperida Kota Bogor

Strategi Digital Berbasis Data untuk Optimalisasi PAD Kota Bogor

SIPASPROP

Penulis : Astarine, S.STP, M.Si. - Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor



Rapat Operasi Sisir Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor. (Sumber : kotabogor.go.id)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan dua komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Kedua jenis pajak ini bukan hanya menjadi sumber penerimaan utama, tetapi juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal secara adil dan efektif. Dalam konteks tersebut, akurasi penilaian properti menjadi sangat penting karena BPHTB ditentukan oleh Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), sedangkan PBB-P2 ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ketika nilai properti tidak mencerminkan harga pasar yang wajar, maka penerimaan daerah berpotensi tidak optimal dan rasa keadilan bagi wajib pajak pun terganggu.

Data tren pendapatan pajak daerah menunjukkan bahwa BPHTB dan PBB-P2 memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan Kota Bogor.

Pada 2022, penerimaan PBB-P2 tercatat sebesar Rp164,13 miliar dan BPHTB sebesar Rp208,24 miliar. Pada 2023, nilainya meningkat menjadi Rp219,09 miliar untuk PBB-P2 dan Rp260,14 miliar untuk BPHTB. Sementara pada 2024, BPHTB kembali naik menjadi Rp286,43 miliar, sedangkan PBB-P2 berada pada angka Rp210,91 miliar. Besarnya kontribusi ini menegaskan bahwa kualitas penilaian objek pajak berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD.

Meski demikian, tingginya kontribusi BPHTB tidak selalu diiringi dengan validitas pelaporan nilai transaksi. Dalam praktiknya, masih ditemukan banyak kasus ketika nilai transaksi yang dilaporkan wajib pajak tidak jauh berbeda dari NJOP, padahal harga pasar riil sebenarnya lebih tinggi. Fenomena under-declaration ini menyebabkan pajak terutang menjadi lebih kecil daripada potensi yang seharusnya dapat dipungut.



Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor.

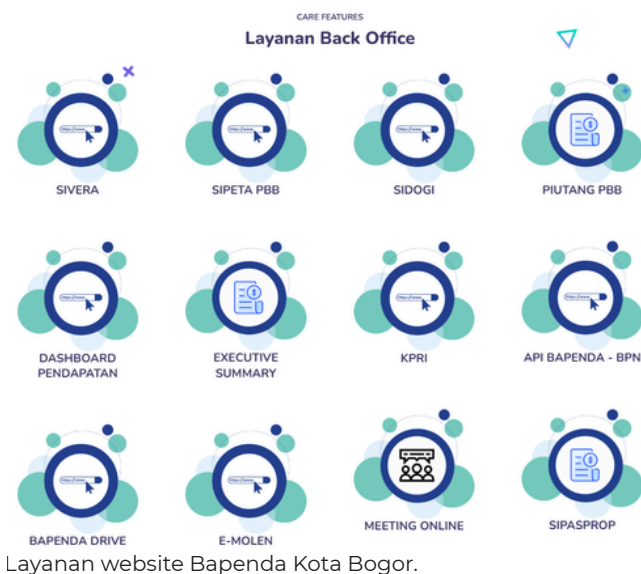
Akibatnya, BPHTB belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen fiskal yang optimal. Lebih jauh, kondisi ini juga menciptakan ketimpangan karena wajib pajak yang melaporkan nilai riil justru dapat menanggung beban yang lebih besar dibandingkan pihak yang melaporkan nilai tidak wajar. Permasalahan tersebut pada dasarnya bersumber dari keterbatasan data pembandingan harga pasar. Selama ini, validasi BPHTB kerap bergantung pada informasi parsial, referensi informal, dan pengalaman masing-masing petugas. Situasi seperti ini membuat proses penilaian menjadi subjektif, tidak seragam, dan rawan menimbulkan perbedaan keputusan antarpegawai. Selain itu, minimnya data pasar yang mutakhir juga menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun Zona Nilai Tanah (ZNT), Nilai Indikasi Rata-rata (NIR), dan penetapan NJOP yang benar-benar mendekati kondisi pasar. Dengan kata lain, kelemahan pada sisi data telah berdampak langsung pada tata kelola perpajakan daerah.

Dalam kerangka regulasi, kebutuhan akan sistem penilaian berbasis pasar sebenarnya telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PMK 208/PMK.07/2018. Kedua aturan tersebut mengamanatkan bahwa penilaian BPHTB dan penetapan NJOP harus dilakukan sedekat mungkin dengan nilai pasar wajar. Di tingkat daerah, kebutuhan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023. Oleh karena itu, keberadaan sistem informasi harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan keharusan administratif dan yuridis agar fungsi pengawasan, verifikasi kewajaran nilai, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat berjalan secara efektif.

Berangkat dari persoalan tersebut, lahirlah gagasan Sistem Informasi Pasar Properti atau Sipasprop. Sistem ini dirancang sebagai bank data harga pasar yang terstruktur, akurat, dan berbasis survei lapangan. Tujuan utamanya adalah menyediakan referensi objektif bagi petugas dalam melakukan validasi BPHTB, menyusun ZNT, membentuk NIR, serta menetapkan NJOP yang lebih presisi. Sipasprop dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen reformasi tata kelola penilaian properti daerah. Kehadiran sistem ini penting karena menggeser proses penilaian dari yang sebelumnya berbasis intuisi menuju mekanisme yang berbasis bukti dan data.

Implementasi Sipasprop dilakukan melalui metodologi survei yang terstruktur. Data dihimpun dari berbagai sumber, seperti transaksi jual beli, penawaran pasar, transaksi lelang, hingga data non-transaksional yang tetap memiliki nilai indikatif, misalnya peralihan hak karena waris dan hibah, data keputusan pertanahan, serta pembagian hak atas tanah. Seluruh data tersebut dikumpulkan secara seragam dengan memperhatikan karakteristik fisik objek dan faktor lingkungan yang memengaruhi nilai. Setelah itu, dilakukan verifikasi berlapis agar hanya data yang valid dan wajar yang masuk ke dalam sistem, sedangkan data yang menyimpang dieliminasi sebagai outlier. Melalui proses ini, Sipasprop membangun basis data pasar yang andal untuk mendukung penilaian properti secara lebih objektif.

Dalam praktik validasi BPHTB, Sipasprop membantu pemeriksaan formal sekaligus penelitian material. Pada tahap formal, sistem memudahkan pengecekan data identitas objek seperti lokasi, luas, dan penggunaan.



Pada tahap material, Sipasprop menyediakan rentang harga pasar di sekitar objek pajak sehingga petugas memiliki dasar yang kuat untuk membandingkan nilai transaksi yang dilaporkan wajib pajak. Ketika ditemukan nilai yang tidak wajar, koreksi NPOP dapat dilakukan secara jabatan berdasarkan data yang lebih kredibel. Pendekatan ini berhasil menekan praktik pelaporan nilai yang terlalu rendah dan meningkatkan presisi dalam proses penilaian.

Dampak penerapan Sipasprop terlihat nyata dalam penilaian PBB-P2. Berdasarkan hasil kegiatan penilaian massal, total NOP meningkat dari 267.123 pada 2022 menjadi 276.450 pada 2023, sedangkan total PBB-P2 meningkat dari Rp223,11 miliar menjadi Rp296,79 miliar. Dari perubahan tersebut, tercatat tambahan potensi sebesar Rp73,68 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pembaruan NJOP berbasis data pasar mampu menghasilkan pengaruh fiskal yang signifikan. Artinya, ketika penilaian dilakukan dengan referensi pasar yang lebih akurat, maka basis pajak menjadi lebih kuat dan penerimaan daerah pun meningkat secara terukur.

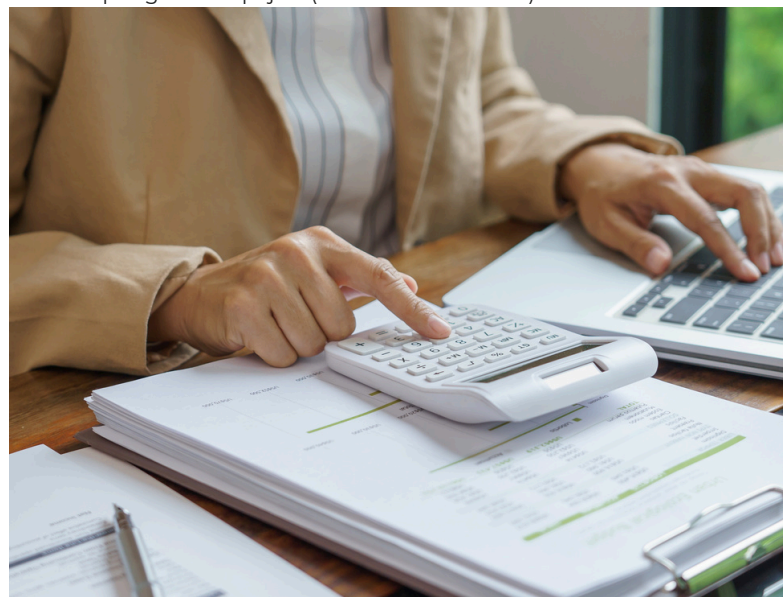
Selain dalam penilaian massal, pengaruh Sipasprop juga sangat terasa pada penilaian individu. Dalam periode 2021–2025, kenaikan nilai setelah penilaian individu berkisar antara 62% hingga 390% per tahun. Bahkan pada objek tertentu, lonjakannya jauh lebih tinggi, seperti Bigland Hotel yang meningkat hingga 8.752%, Metrasat (Telkom) sebesar 3.149%, dan

D'Sawah Resto & Resort sebesar 544%. Temuan ini membuktikan bahwa sebelumnya terdapat potensi pajak yang sangat besar namun belum tergalikan akibat terbatasnya data pembanding pasar.

Di sisi lain, hasil validasi SSPD BPHTB selama 2021–2025 juga menunjukkan total kurang bayar sebesar Rp2,68 miliar, yang menegaskan bahwa validasi berbasis data memiliki peran besar dalam meningkatkan akurasi pelaporan dan pengendalian penerimaan daerah.

Secara keseluruhan, Sipasprop dapat dipandang sebagai inovasi strategis dalam modernisasi perpajakan daerah Kota Bogor. Sistem ini bukan sekadar aplikasi pendukung, melainkan fondasi bagi penilaian properti yang lebih objektif, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pasar. Ke depan, prospek pengembangannya juga sangat terbuka melalui integrasi dengan GIS, pemanfaatan machine learning, dan sinkronisasi dengan layanan pajak digital lainnya. Dengan arah pengembangan tersebut, Sipasprop berpotensi menjadi bagian dari ekosistem penilaian otomatis yang memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Inovasi ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada intensitas pemungutan, tetapi juga pada kualitas data, ketepatan penilaian, dan keberanian melakukan transformasi digital berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Ilustrasi pengelolaan pajak. (Sumber: canva.com)



KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

dari Sekadar Kartu Menuju Akses Layanan dan Perlindungan Anak

Penulis : Wardhani, S.P., M.P. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor



Kegiatan pencanangan adminduk pelayanan bagi penyandang disabilitas oleh Disdukcapil Kota Bogor.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan hukum atas keberadaan dan status kependudukan anak sejak dini. KIA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam perlindungan hak sipil anak, termasuk akses terhadap berbagai layanan publik. Secara regulatif, KIA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa KIA merupakan identitas resmi bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah, sehingga keberadaannya menjadi bagian penting dalam sistem administrasi kependudukan serta upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh negara.

Mengapa masih banyak masyarakat yang belum peduli terhadap kepemilikan dan pemanfaatan KIA?

Beberapa faktor dapat menjelaskan kondisi tersebut, sebagai berikut :

1. Persepsi "Belum Mendesak"

Banyak orang tua merasa KIA belum diperlukan karena anak masih bergantung pada Kartu Keluarga (KK). Selama layanan publik tidak secara eksplisit mensyaratkan KIA, masyarakat cenderung menunda pengurusannya.

2. Manfaat Belum Terlihat Nyata

Sebagian masyarakat belum merasakan manfaat langsung dari KIA dalam kehidupan sehari-hari. Jika kartu belum digunakan secara aktif dalam pendaftaran sekolah, layanan kesehatan, atau program bantuan, maka urgensinya menjadi kurang terasa.

3. Integrasi Layanan Belum Optimal

KIA belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh SOP pelayanan Perangkat Daerah maupun mitra usaha. Akibatnya, kepemilikan tidak selalu berbanding lurus dengan pemanfaatan.

4. Literasi Administrasi Kependudukan

Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya dokumen kependudukan sejak dini. Kesadaran administrasi sering kali baru muncul ketika ada kebutuhan mendesak.

5. Faktor Sosial dan Akses Informasi

Sebagian masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kemudahan dan gratisnya pembuatan KIA. Sosialisasi yang belum merata juga memengaruhi tingkat kepedulian.

Dengan demikian, tantangan pengembangan Kartu Identitas Anak (KIA) saat ini tidak hanya terletak pada upaya meningkatkan angka kepemilikan, tetapi juga pada pembangunan kesadaran kolektif masyarakat bahwa identitas anak merupakan investasi jangka panjang bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ketika KIA terintegrasi secara nyata dalam berbagai layanan publik serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, maka kepedulian terhadap kepemilikan dan pemanfaatannya akan tumbuh secara alami. Oleh karena itu, kunci penguatan KIA terletak pada dua aspek utama, yaitu penguatan regulasi di tingkat daerah serta peningkatan nilai guna KIA dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Potret Data Kota Bogor

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Bogor Semester II Tahun 2025, jumlah anak usia 0–16 tahun yang wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tercatat sebanyak 315.001 anak. Dari jumlah tersebut, 210.364 anak (66,78%) telah memiliki KIA, sementara 104.637 anak (33,22%) lainnya belum memiliki KIA. Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa 1 dari 3 anak di Kota Bogor masih belum memiliki KIA, sehingga upaya peningkatan kepemilikan identitas anak masih perlu terus diperkuat.

Capaian 66,78% menunjukkan progres yang cukup baik dalam upaya peningkatan kepemilikan identitas anak. Namun demikian, angka 33,22% yang belum memiliki KIA bukanlah angka kecil. Lebih dari seratus ribu anak masih berada di luar cakupan identitas resmi yang diakui negara.

Di sisi lain, tantangan tidak berhenti pada kepemilikan. Dari 210.364 anak yang telah memiliki KIA, pemanfaatannya dalam layanan public, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan social, maupun dalam layanan usaha dan mitra swasta, masih relatif terbatas. KIA belum sepenuhnya menjadi dokumen yang “hidup” dalam sistem pelayanan sehari-hari.

Data ini menunjukkan dua tantangan besar yang harus dijawab secara simultan, yaitu :

1. Kepemilikan belum optimal. Masih diperlukan strategi percepatan agar seluruh anak tercatat dan memiliki identitas resmi.
2. Pemanfaatan belum maksimal. KIA perlu diintegrasikan secara nyata dalam sistem pelayanan agar memberikan nilai guna langsung bagi masyarakat.

Dengan demikian, penguatan kebijakan ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan angka kepemilikan, tetapi juga pada transformasi KIA menjadi instrumen pelayanan yang terintegrasi, fungsional, dan bernilai tambah bagi anak dan keluarga di Kota Bogor.



Kegiatan edukasi perlindungan anak Kota Bogor.

Mengapa Masyarakat Belum Peduli ?

1. Persepsi Manfaat

Salah satu penyebab utama rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah persepsi bahwa manfaatnya belum dirasakan secara langsung. Sebagian orang tua masih memandang KIA sebagai dokumen tambahan yang belum dianggap mendesak untuk dimiliki, sehingga muncul berbagai pemikiran di masyarakat bahwa identitas anak belum diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau masih dapat digantikan oleh dokumen kependudukan lainnya.

"Anak belum perlu identitas."

"Sudah ada Kartu Keluarga."

"Belum pernah diminta KIA saat mengurus layanan."

Cara pandang ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan persepsi publik. Secara normatif, KIA merupakan identitas resmi anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Namun dalam praktik sehari-hari, apabila KIA belum secara konsisten diminta dalam layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, atau layanan usaha, maka masyarakat tidak merasakan urgensi untuk memilikinya.

Dalam logika sederhana masyarakat

"Jika tidak diminta, berarti tidak wajib."

Di sinilah tantangan kebijakan muncul. Ketika manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) belum terintegrasi secara nyata dalam sistem pelayanan, maka kepemilikan KIA cenderung hanya menjadi angka administratif dan belum dipandang sebagai kebutuhan yang penting oleh masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan kepedulian tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi semata, tetapi juga diikuti dengan integrasi KIA dalam prosedur pelayanan publik dan layanan usaha agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh orang tua dan anak. Dengan demikian, kepedulian masyarakat akan tumbuh secara alami ketika nilai guna KIA benar-benar hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.



Foto anak Indonesia. (Sumber: canva.com)

2. Minim Integrasi Layanan

Faktor kedua yang memengaruhi rendahnya kepedulian terhadap KIA adalah belum optimalnya integrasi KIA dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. Secara regulatif, KIA telah ditegaskan sebagai identitas resmi anak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Namun dalam praktik penyelenggaraan layanan, keberadaannya belum sepenuhnya menjadi instrumen utama dalam verifikasi maupun akses pelayanan. Beberapa kondisi yang masih terjadi di lapangan antara lain:

- Belum menjadi syarat standar dalam layanan pendidikan (misalnya pendaftaran atau administrasi peserta didik).
- Belum selalu dimanfaatkan dalam layanan kesehatan sebagai identitas anak yang terverifikasi.
- Belum banyak digunakan dalam proses verifikasi bantuan sosial berbasis data anak.
- Belum menjadi instrumen akses promo, diskon, atau manfaat khusus dari mitra usaha secara luas dan konsisten.

Akibatnya, masyarakat memandang bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) belum memiliki posisi yang strategis dalam sistem pelayanan. Selama kartu tersebut belum menjadi bagian dari prosedur resmi dalam berbagai layanan, kepemilikannya cenderung dianggap sebagai pilihan, bukan kebutuhan yang mendesak. Kondisi ini pada akhirnya semakin memperkuat persepsi di masyarakat bahwa kepemilikan KIA belum menjadi hal yang penting untuk segera dimiliki.

Padahal, ketika Kartu Identitas Anak (KIA) terintegrasi dalam sistem pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta kemitraan dengan layanan usaha, maka kartu tersebut akan memiliki fungsi yang nyata sebagai alat identifikasi, validasi data, sekaligus akses terhadap berbagai manfaat layanan. Dengan demikian, peningkatan kepedulian masyarakat tidak hanya bergantung pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi juga memerlukan kebijakan yang bersifat integratif, yaitu dengan menempatkan KIA sebagai bagian dari ekosistem pelayanan publik dan pelayanan usaha di daerah.

3. Sosialisasi dan Literasi Administrasi

Faktor berikutnya yang memengaruhi rendahnya kepedulian terhadap KIA adalah literasi administrasi kependudukan yang belum merata serta sosialisasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal.

Selama masih terdapat masyarakat yang berperilaku sebagai berikut :

- Belum memahami fungsi dan kedudukan KIA sebagai identitas resmi anak
- Belum mengetahui bahwa prosedur pembuatannya mudah dan tidak dipungut biaya (gratis)
- Menganggap pengurusan dokumen kependudukan sebagai proses yang rumit dan memakan waktu

Persepsi tersebut sering kali muncul akibat pengalaman masa lalu ataupun informasi yang belum lengkap di masyarakat. Padahal, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan bagian dari sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi. Dalam praktiknya, penerbitan KIA bahkan dapat dilakukan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran maupun pembaruan Kartu Keluarga (KK), sehingga orang tua tidak perlu melakukan pengurusan dokumen secara berulang.

Artinya, hambatan yang terjadi tidak semata-mata terletak pada sistem pelayanan, melainkan juga pada pemahaman dan kebiasaan administrasi di masyarakat. Kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan sering kali baru muncul ketika ada kebutuhan yang mendesak, bukan sebagai langkah preventif dalam menjamin perlindungan hak anak sejak dini. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga perlu membangun pemahaman bahwa dokumen kependudukan bukan sekadar arsip administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum sekaligus akses masa depan bagi anak. Ketika literasi administrasi kependudukan masyarakat meningkat, maka kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua dalam menjamin hak identitas anak.



KIA dan Perlindungan Hak Anak

KIA bukan sekadar kartu administratif, melainkan instrumen strategis dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dini. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, KIA merupakan identitas resmi bagi anak yang terintegrasi dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Secara substantif, KIA memiliki fungsi strategis sebagai berikut :

1. Bukti Identitas Resmi Anak

KIA menjadi pengakuan hukum atas keberadaan anak sebagai subjek hukum yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas ini penting untuk memastikan setiap anak tercatat secara sah dalam sistem negara.

2. Perlindungan dari Risiko Perdagangan dan Eksploitasi

Identitas yang terdokumentasi dengan baik membantu mencegah praktik perdagangan anak, eksploitasi, maupun penyalahgunaan identitas. Dengan data yang terverifikasi, mobilitas dan keberadaan anak dapat lebih mudah dipantau dalam sistem administrasi resmi.

3. Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan
KIA dapat menjadi instrumen validasi data dalam layanan sekolah, fasilitas kesehatan, maupun program perlindungan sosial. Identitas yang jelas mempermudah akses anak terhadap hak dasar yang dijamin negara.

4. Dasar Pemutakhiran Data Kependudukan Berbasis NIK

Karena KIA terhubung dengan NIK, maka data anak menjadi bagian dari sistem kependudukan terpadu. Hal ini mendukung perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta kebijakan berbasis data yang lebih akurat.

Dengan demikian, Kartu Identitas Anak (KIA) berperan penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak berbasis data. Tanpa identitas yang terdokumentasi secara resmi, seorang anak berpotensi tidak tercatat dalam sistem pelayanan negara sehingga rentan terlewat dari berbagai program perlindungan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, identitas bukan sekadar kartu administratif, melainkan pintu masuk bagi perlindungan, akses layanan, dan jaminan masa depan anak.



Foto anak Indonesia. (Sumber: canva.com))

Nilai Guna KIA dalam Pelayanan Publik

KIA akan memiliki daya ungkit yang besar apabila dioptimalkan dalam sistem pelayanan publik. Sebagai identitas resmi yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), KIA berpotensi menjadi instrumen verifikasi data anak yang akurat dan terpercaya.

Jika diintegrasikan secara konsisten, KIA dapat :

- Menjadi identitas utama dalam pendaftaran sekolah, baik pada jenjang PAUD, SD, maupun layanan pendidikan lainnya, sehingga data peserta didik selaras dengan data kependudukan.
- Digunakan dalam layanan BPJS dan fasilitas kesehatan, sebagai identitas anak yang sah dan terverifikasi dalam sistem administrasi.
- Mendukung verifikasi penerima bantuan sosial, memastikan bantuan tepat sasaran berdasarkan data kependudukan yang valid.
- Menjadi basis data program perlindungan anak, termasuk intervensi gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial berbasis NIK.

Optimalisasi ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang menempatkan KIA sebagai identitas resmi anak dalam sistem administrasi kependudukan.

Integrasi KIA dalam pelayanan publik akan memberikan dua dampak strategis, sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi, karena setiap layanan menggunakan identitas yang seragam dan terstandar.
2. Meningkatkan akurasi data kependudukan, yang berdampak pada perencanaan pembangunan dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, KIA bukan hanya dokumen kepemilikan, tetapi instrumen penguatan tata kelola pelayanan publik yang berbasis data dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Nilai Guna KIA dalam Layanan Usaha

Selain dalam pelayanan publik, KIA juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam ekosistem layanan usaha melalui kolaborasi dengan mitra swasta. Integrasi KIA dalam sektor usaha dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kepemilikan identitas anak.

Kolaborasi tersebut membuka berbagai peluang, antara lain :

1. Diskon khusus anak, misalnya pada wahana bermain, toko buku, pusat edukasi, atau layanan rekreasi.
2. Promo keluarga, yang memberikan insentif bagi keluarga yang memiliki KIA sebagai bentuk dukungan terhadap tertib administrasi.
3. Fasilitas ramah anak, seperti jalur prioritas, ruang bermain, atau layanan khusus anak yang terverifikasi identitasnya.
4. Program loyalitas berbasis KIA, di mana KIA menjadi instrumen validasi untuk mendapatkan poin, akses khusus, atau manfaat tertentu.

Dengan pendekatan ini, Kartu Identitas Anak (KIA) tidak hanya dipahami sebagai identitas administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, tetapi juga berkembang menjadi kartu manfaat sosial-ekonomi yang memberikan dampak langsung bagi keluarga. Ketika masyarakat mulai merasakan manfaat konkret, seperti diskon, kemudahan akses, maupun layanan khusus bagi anak, maka kepemilikan KIA tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai kebutuhan yang memiliki nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi KIA dalam layanan usaha pada akhirnya akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam membangun ekosistem kota yang ramah anak, tertib administrasi, serta berbasis data.

Strategi Penguatan Dari Kepemilikan ke Pemanfaatan

Berdasarkan data Semester II Tahun 2025, masih terdapat 104.637 anak di Kota Bogor yang belum memiliki KIA. Angka ini menunjukkan bahwa strategi ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada pencetakan kartu, tetapi harus bertransformasi menuju pemanfaatan aktif dan terintegrasi.

Penguatan kebijakan perlu difokuskan pada langkah strategis berikut :

1. Integrasi KIA dalam SOP OPD

Setiap Perangkat Daerah perlu memasukkan KIA sebagai bagian dari standar verifikasi identitas anak dalam layanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak. Integrasi ini akan menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik pelayanan.

2. Kerja Sama Aktif dengan Minimal 20 Mitra Usaha

Kolaborasi dengan sektor swasta akan meningkatkan nilai guna KIA melalui diskon, promo keluarga, fasilitas ramah anak, dan program loyalitas. Semakin banyak mitra terlibat, semakin terasa manfaat langsung bagi masyarakat.

3. Sosialisasi Berbasis Sekolah dan Posyandu

Pendekatan jemput bola melalui sekolah, PAUD, dan posyandu akan efektif menjangkau orang tua. Edukasi dapat dilakukan bersamaan dengan pelayanan administrasi kependudukan agar lebih efisien.

4. Monitoring Capaian Setiap Semester

Evaluasi berkala penting untuk memastikan progres peningkatan kepemilikan dan pemanfaatan. Data semesteran dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan.

5. Kampanye Publik “Punya KIA, Banyak Manfaatnya”

Kampanye yang komunikatif dan mudah dipahami akan membangun persepsi positif masyarakat. Fokusnya bukan hanya pada kewajiban administratif, tetapi pada manfaat nyata bagi anak dan keluarga. Oleh karena itu, target kebijakan ke depan bukan semata-mata menaikkan angka kepemilikan, tetapi meningkatkan angka pemanfaatan aktif sehingga KIA benar-benar menjadi instrumen pelayanan, perlindungan, dan kesejahteraan anak di Kota Bogor.

KIA adalah Investasi Masa Depan Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) bukan sekadar kartu plastik berwarna Pink, tapi KIA adalah :

- Identitas
- Perlindungan
- Akses layanan
- Simbol pengakuan negara terhadap anak

Dari 315.001 anak di Kota Bogor, masih terdapat 104.637 anak yang belum memiliki KIA. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi representasi anak-anak yang belum sepenuhnya terhubung dalam sistem administrasi negara—belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Tanpa identitas yang kuat dan terdokumentasi secara resmi, seorang anak berpotensi terlewat dari berbagai layanan, program perlindungan, serta kebijakan yang berbasis data. Sebaliknya, ketika setiap anak memiliki dan memanfaatkan Kartu Identitas Anak (KIA), maka kehadiran negara dalam menjamin hak-hak anak dapat dirasakan secara nyata. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan KIA menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap anak tercatat, terlindungi, dan memperoleh akses layanan secara adil dan setara.

- Tercatat secara sah
- Terlindungi secara hukum
- Mendapatkan akses layanan secara setara

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan investasi jangka panjang, bukan hanya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan saat ini, tetapi juga untuk memastikan masa depan anak yang lebih terlindungi dan terjamin. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama untuk menjadikan KIA lebih bermanfaat, lebih bernilai guna, serta semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Bogor.

**KIA MERUPAKAN INVESTASI JANGKA
PANJANG UNTUK MEMASTIKAN
MASA DEPAN ANAK YANG LEBIH
TERLINDUNG DAN TERJAMIN**



KARTU IDENTITAS ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KAMU KEREN KALAU PUNYA KIA

Akses Layanan Publik

KIA memfasilitasi anak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan (BPJS, klaim asuransi), pendidikan, dan transportasi

Identitas Diri

KIA adalah bukti identitas resmi anak, yang memudahkan mereka dalam berbagai urusan administratif seperti pendaftaran sekolah, mengurus perbankan, dan lainnya



Perlindungan Anak

KIA berperan dalam melindungi hak-hak anak, termasuk mencegah perdagangan anak dan memberikan jaminan keamanan saat anak mengalami peristiwa buruk

Pemenuhan Hak Anak

KIA memastikan setiap anak diakui secara hukum dan mendapat perlindungan identitas

Persyaratan Pembuatan KIA

- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran
- Foto Anak (jika sudah berusia > 5 Tahun)

Pengajuan Pembuatan KIA

Pengajuan bisa dilakukan secara offline di kantor Disdukcapil Kota Bogor atau secara online melalui PAKUAN PRIMA



Chat Sampurasun Dukcapil
0812 9000 3271

Web Portal Layanan Online
disdukcapil.kotabogor.go.id



AYO JADI BAGIAN GERAKAN BOGOR RAMAH ANAK

Dalam rangka mendukung program nasional dan meningkatkan pemanfaatan **Kartu Identitas Anak (KIA)**

Kami membuka peluang kerja sama dengan pelaku **usaha dan lembaga** layanan publik.
Ayo jadi bagian dari **GERAKAN BOGOR RAMAH ANAK!**



Apa itu KIA ?

KIA adalah identitas resmi untuk anak usia 0–17 tahun (kurang 1 hari) yang diterbitkan oleh Disdukcapil.



Partner Mitra

- Toko / Ritel
- Tempat Makan
- Tempat Hiburan
- Klinik / Rumah Sakit
- Sekolah atau Lembaga Pendidikan
- dan semua layanan komersil ramah anak



Bentuk Kerja Sama

- Diskon Produk untuk Pemilik KIA
- Promo / Voucher Khusus Pemilik KIA
- Akses Prioritas atau Program Loyalitas Anak



Manfaat Bagi Mitra

- Dukungan dan promosi di berbagai kanal resmi Pemerintah Kota Bogor
- Citra positif sebagai usaha ramah anak
- Kontribusi nyata dalam perlindungan hak anak

TERTARIK?

Info & Pendaftaran kerja sama bisa menghubungi :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
Jl. Achmad Adnawijaya No. 45 - Bogor
WhatsApp ke Sampurasun Dukcapil : 081290003271



Chat Sampurasun Dukcapil
0812 9000 3271

Web Portal Layanan Online
disdukcapil.kotabogor.go.id



Strategi Komunikasi dalam Membangun Ketahanan Mental Remaja untuk Mencegah PERILAKU BULLYING

Penulis : Andreanda Nasution SKM.,M.kes (Promkes), Cahaya Listiandini putri (Manajemen Pelayanan Kesehatan, Bram Burmanajaya, SKM. M. Kep. (Promkes),Desy Herawati SKM, MH Kes (Promkes), Adhi Dharmawan Tato, SKM,MPH (Gizi), Novi Fajar Utami (Fitokimia Farmasi), Ika Lastyaningrum,SKM,MKM (Promkes), Ratna Yussi Pazriani,SKM (Promkes), Griet Helena (Manajemen Pendidikan)
– Universitas Ibn Khaldun

Remaja sebagai individu atau personal yang mengalami masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa mengalami gelombang kehidupan yang dapat dikatakan begitu unik, tetapi hal ini rentan sekali berdampak pada kesehatan mental remaja. Berbagai macam perubahan dan tekanan tentu dirasakan, seperti perubahan hormonal, perubahan fisik, tuntutan sosial. Hal tersebut menjadi beberapa faktor yang dapat berdampak pada kesehatan mental remaja. Masa remaja, juga disebut sebagai masa pencarian jati diri. Eksplorasi dan rasa ingin tahu menjadi ketertarikan utama pada remaja untuk mencoba berbagai macam hal, tetapi tentu perlu adanya pengarahan dan pengawasan pada fase tersebut. Eksplorasi diri pada remaja sangat rentan terhadap permasalahan mental remaja, butuh ketepatan waktu dalam memperbaikinya sebelum berakibat fatal.

Korban perundungan pada remaja. (Sumber: canva.com)

Kehidupan sosial masa remaja saat ini banyak dipengaruhi oleh dampak globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Dampak yang diterima para remaja saat ini mungkin tidak hanya dampak positif namun beriringan dengan dampak negatifnya. Dampak negatif yang bisa terlihat secara jelas dan nyata di masyarakat adalah film atau bacaan yang berkaitan dengan kasus bullying. Sayangnya, kasus bullying terkadang justru dipahami secara keliru oleh para remaja dan dijadikan contoh perilaku, sehingga mereka meniru dan berperan sebagai seorang pembully.

Kasus yang saat ini secara eksplisit diketahui dari kacamata masyarakat secara umum adalah kasus bullying pada remaja, terutama di lingkungan sekolah. Selain kasus bullying, banyak sekali kasus lainnya seperti yang diketahui khalayak baik melalui kejadian secara real-time ataupun yang biasa ditemui di media sosial, seperti kasus narkoba, pesta miras, seks bebas, sampai kasus bunuh diri. Kesehatan mental pada generasi muda saat ini menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, karena krisis ini akan sangat berdampak bagi generasi muda penerus bangsa untuk kedepannya (Hymel, S., & Swearer, S. M. (2015).

Hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi kita semua untuk ikut berperan membantu para remaja dalam menghadapi berbagai permasalahan mentalnya. Kita dapat menjadi ruang aman bagi remaja untuk bercerita dan sebagai pendengar yang baik dari apa yang dirasakan oleh mereka dari segi emosional dan lainnya yang ingin mereka curahkan kepada kita, dan langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya kita untuk membantu permasalahan kesehatan mental pada remaja.

Penanganan pada permasalahan kesehatan mental remaja tentu tidaklah mudah, kita juga perlu memahami berbagai macam pendekatan yang tepat untuk mendampingi remaja agar masa pencarian jati diri ini terarah pada koridor yang tepat.

Dampak yang terjadi apabila kita salah dalam mengambil langkah untuk menangani permasalahan mental remaja ini cukup krusial terhadap psikologis dan juga dampak terhadap lingkungan sosialnya. Maka dari itu, perlu sekali adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari keluarga, teman sebaya, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah setempat dalam bekerja sama untuk menangani permasalahan kesehatan mental pada remaja melalui pencegahan yang berkelanjutan agar kita dapat menciptakan kesehatan mental yang baik bagi para remaja untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh untuk masa depan mereka.

Bullying: Salah Satu Bukti Permasalahan Kesehatan Mental pada Remaja Lintas Masa

Perlu diketahui bahwa kesehatan mental remaja merupakan kondisi dimana seorang remaja mampu berfungsi dengan baik secara emosional, sosial, dan psikologis. Kemampuan ini dapat diartikan bahwa remaja dapat mengelola stres dan kembali membangun hubungan yang sehat dan dapat mencapai potensi mereka. Kesehatan mental pada remaja bersifat dinamis, yakni dapat berubah seiring berjalannya waktu dan pengaruh dari berbagai faktor sehingga hal ini menjadi aspek yang sangat penting untuk perkembangan individu atau personal pada remaja. Namun, bagaimana sifat dinamis pada kesehatan remaja ini dapat berdampak kembali pada remaja? Pertanyaan tersebut tentu dapat kita ketahui berbagai dampak yang diberikan baik dari sisi positif dan negatif.

Tidak dipungkiri bahwa dari ketidaktahuan remaja untuk dapat mengelola dan menjaga kesehatan mereka dapat berakibat fatal, salah satu akibat yang telah disebutkan sebelumnya yakni maraknya terjadi bullying. Bullying dapat terjadi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tetapi, umumnya pada saat ini kasus bullying marak terjadi di lingkungan sekolah. Terjadinya bullying bisa terjadi tanpa disadari oleh remaja bahwa hal tersebut merupakan langkah kecil yang berpotensi menimbulkan bullying.



Keluarga tidak harmonis. (Sumber: kumparan.com)

Bullying telah didefinisikan sebagai subkategori dari agresi interpersonal yang ditandai oleh unsur kesengajaan, kejadian berulang, dan ketidakseimbangan kekuatan, dengan penyalahgunaan kekuasaan menjadi perbedaan utama antara bullying dan bentuk kekerasan lainnya (misalnya, Smith & Morita, 1999; Vaillancourt, Hymel, & McDougall, 2003). Secara sederhana, segala bentuk kekerasan baik yang dilakukan secara verbal ataupun non verbal dengan adanya unsur kesengajaan dan kejadian yang berulang karena ketidakseimbangan kekuatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki itu disebut dengan bullying. Umumnya, remaja tidak akan menyadari bahwa ejekan secara verbal merupakan langkah kecil dari bully.

Diketahui secara bersama dan tanpa kita sadari bahwa bullying terjadi secara lintas masa dan lintas generasi. Hal yang selama ini dianggap wajar dalam lingkup pertemanan di sekolah, justru menjadi percikkan kecil potensi timbulnya bullying di lingkungan sekolah. Saat ini, kasus bullying di sekolah masih menjadi tantangan besar yang kita hadapi.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pada remaja di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Keluarga yang seharusnya menjadi 'rumah' dan ruang aman bagi remaja untuk bercerita dan menemukan kasih sayang dari orang tua, justru terkadang menjadi wadah yang menciptakan pandangan yang mewajarkan terjadinya kekerasan di rumah.

Biasanya hal ini timbul dari yang keluarga yang bermasalah seperti: orang tua yang menghukum anak secara berlebihan, kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak sebagai bentuk rasa aman dan nyaman seorang anak di rumah, konflik atau kekerasan dalam rumah tangga yang sering dipertontonkan kepada anak, dan hilangnya peran orang tua dalam diri seorang anak. Melalui hal tersebut, anak dapat mempelajari perilaku bullying dengan mengamati konflik yang terjadi di rumah kemudian mengadopsi dan mempraktikkannya terhadap teman-temannya di sekolah. Sikap orang tua yang abai terhadap perilaku dan karakter anak dapat membuat anak menjadi pribadi yang kasar dan tidak terkontrol. Selain itu, bullying ini bisa terjadi sebagai bentuk pelampiasan seorang remaja dari suasana rumah yang tidak harmonis. Mereka belajar bahwa yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dapat dengan leluasa berperilaku agresif dan hal ini menciptakan status dan kekuasaan pada anak di lingkungan pertemanannya.

2. Faktor Sekolah

Pihak sekolah yang seringkali abai terhadap perilaku bullying yang terjadi dan menganggap hal tersebut sebagai bentuk 'kewajaran' pada masa remaja justru menimbulkan langkah kecil dari terjadinya bullying di sekolah. Terkadang yang terjadi adalah ketika kejadian bully mendapatkan perhatian dari pendidik dan diberikan hukuman atau sanksi, justru sanksi tersebut tidak memberikan efek membangun dan mengembangkan rasa menghargai dan menghormati pada remaja sehingga kemungkinan kejadian bully terjadi secara berulang cukup besar.

3. Faktor Lingkungan Masyarakat

Kemudian faktor lingkungan dapat menjadi penyebab yang besar dari pembentukan perilaku bullying pada remaja. Remaja yang hidup dan tumbuh di lingkungan yang menormalisasikan kekerasan dan tinggal dengan masyarakat ekonomi kelas bawah yang dapat melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat memungkinkan untuk menyebabkan timbulnya bullying di lingkungan pertemanannya. Tidak heran jika marak terjadi pemalakan di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh peserta didik.

4. Faktor Teman Sebaya

Kelompok teman sebaya (circle) yang memiliki masalah di sekolah dapat menjadi penyebab dari terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Beberapa remaja melakukan bullying sebagai usaha untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk bergabung dengan kelompok tersebut dan agar dirinya tidak menjadi sasaran bully dari kelompok bullying walaupun diri mereka merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Namun, perlahan hal ini menjadi pola yang berkelanjutan dalam lingkup pertemanan saat terjadinya bullying.

5. Faktor Media

Tayangan atau adegan yang memperlihatkan secara jelas mengenai kekerasan, kata-kata kasar, dan berbagai hal negatif lainnya dapat membentuk pola perilaku bullying. Umumnya anak dapat meniru adegan film atau tayangan lain yang disaksikannya. Hal ini dapat menimbulkan perilaku anak yang keras dan kasar. Hal ini dapat memicu terjadinya bullying yang dilakukan remaja terhadap teman-temannya di sekolah.

6. Faktor Budaya

Faktor kriminal budaya menjadi salah satu penyebab terjadinya bullying yang diakibatkan dari suasana politik yang kacau, keadaan ekonomi yang tengah tidak menentu, adanya konflik di masyarakat, terdapat prasangka dan diskriminasi, dan etnosentrisme. Beberapa faktor tersebut dapat mendorong remaja menjadi seseorang yang stress, arogan, depresi, dan kasar. Hal ini menimbulkan adanya perilaku bullying pada remaja

Melalui faktor-faktor penyebab bullying, kita dapat belajar bahwa rantai faktor bullying pada remaja di sekolah cukup kompleks dan berdampak besar terhadap pembentukan karakter atau kepribadian anak. Tidak mudah peran kita sebagai pendamping remaja untuk mencegah timbulnya perilaku tersebut. Kita pun harus belajar secara mendalam dan mempraktikkannya mengenai perilaku remaja sebagai contoh positif untuk membentuk karakter mereka.



Perundungan pada remaja. (Sumber: refoindonesia.com)

Peran Forum Komunikasi Kota Bogor untuk Mengenali dan Menggali Penyebab Bullying di Sekolah

Praktisi di bidang kesehatan dan lintas sektor bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan bullying pada remaja di sekolah, terutama di Kota Bogor. Bersama Forum Komunikasi Kesehatan Kota Bogor melakukan kampanye anti-bullying dengan berkunjung ke 15 Sekolah Menengah Pertama PGRI se-Kota Bogor. Pendekatan promotif dan preventif dilakukan dengan melaksanakan edukasi dan sosialisasi mengenai bullying di sekolah. Antusiasme yang disambut dengan baik oleh para peserta didik di sekolah terhadap materi yang dipaparkan menjadi salah satu penyemangat Forum Komunikasi Kesehatan Kota Bogor dalam menyuarkan anti-bullying pada remaja di sekolah.

Upaya yang dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya bullying di sekolah dilakukan dengan metode kuantitatif yang dilengkapi pengisian kuisioner melalui google form dan dijawab atau dikerjakan oleh para peserta didik. Hasil yang didapatkan dari kuisioner yang telah diisi oleh 551 responden dengan rentang usia 12–15 tahun dan merupakan kelompok peserta didik kelas 7–9 SMP adalah sebagai berikut:



Grafik Jawaban dari Pertanyaan Indikasi Sosial-Emosional

Hasil dari pertanyaan indikasi sosial dan emosional dari para peserta didik menunjukkan persentase sebesar 20% yang mengalami perubahan emosi cepat, 15% merasa takut tanpa sebab, dan 10% sulit tidur atau mimpi buruk.



Grafik Jawaban dari Pertanyaan Tanda Fisik dan Interaksi Sosial

Hasil dari pertanyaan tanda fisik dan interaksi sosial dari peserta didik menunjukkan persentase sebesar 25%, peserta didik mengantuk saat pelajaran, 12% cenderung pasif dan menarik diri dari kegiatan sosial, dan 8% tidak diajak kerja kelompok.



Grafik Jawaban dari Pertanyaan Latar Belakang Keluarga dan Trauma

Hasil dari pertanyaan latar belakang keluarga dan trauma dari peserta didik menunjukkan persentase sebesar 10% memiliki pengalaman traumatik, 5% tinggal hanya dengan salah satu orang tua, dan 3% melaporkan orang tua berpisah.

Berdasarkan data tersebut, perlu adanya perhatian khusus dan pendekatan kepada peserta didik dan siswi di SMP PGRI se-Kota Bogor mengenai adanya indikasi psikologis dan sosial terhadap peserta didik. Secara tidak langsung, peserta didik tidak menyatakan bahwa terjadi perilaku bullying terhadap dirinya baik sebagai pelaku ataupun korban. Namun, perlu diketahui secara saksama bahwa dampak dari bullying terhadap remaja yaitu mengakibatkan cedera fisik, tekanan sosial dan emosional, timbul tindakan menyakiti diri sendiri, bahkan kematian.

Selain itu, juga dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, kesulitan tidur, pencapaian akademik yang lebih rendah, dan potensi putus sekolah. Bagi pelaku bullying, hal ini memiliki risiko tinggi untuk penyalahgunaan narkoba, memiliki masalah akademik, dan mengalami kekerasan di kemudian hari (baik pada masa remaja atau dewasa). Efek dari bullying ini dapat berjangka pendek, menengah ataupun panjang bagi yang terlibat, saksi, ataupun korban.

Mengetahui dan Mengenali: Upaya Pencegahan Perilaku Bullying pada Remaja di Kota Bogor

Hasil kuisisioner yang telah dilaksanakan terhadap 551 peserta didik SMP PGRI se-Kota Bogor, ditemukan bahwa meskipun mayoritas peserta didik tidak secara langsung menyatakan mengalami perundungan, banyak dari mereka menunjukkan indikasi psikologis dan sosial yang patut diperhatikan seperti:

- Perubahan emosi yang cepat, perasaan takut tanpa sebab, dan gangguan tidur
- Tanda-tanda menarik diri dari lingkungan sosial seperti enggan terlibat dalam kegiatan atau tidak diajak kerja kelompok, dan faktor risiko dari latar belakang keluarga.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Forum Komunikasi Kesehatan Kota Bogor terus hadir untuk memberikan peran sebagai pendamping remaja melalui komunikasi interpersonal dalam membentuk kepribadian remaja di fase pencarian jati dirinya untuk bertumbuh dalam lingkungan yang positif dan berkarakter unggul.

Memperhatikan secara bijak fase pertumbuhan remaja, menjadikan diri sebagai ruang aman bagi remaja untuk bercerita, menjadikan orang tua sebagai 'rumah' bagi remaja, merupakan bentuk upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk bisa menjadi 'teman terbaik' bagi anak. Edukasi menjadi hal penting yang perlu disampaikan selalu kepada anak yang menginjak usia remaja sebagai pengingat dan menambah pengetahuan bagaimana etika dan berperilaku di masyarakat.

Pembentukan emosional yang baik bagi remaja tentu menjadi tanggung jawab yang besar. Kesehatan mental remaja menjadi perhatian khusus bagi orang tua, tetapi tidak melupakan untuk membentuk remaja menjadi karakter yang kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Pencegahan yang dilakukan terkait timbulnya perilaku bullying terhadap remaja adalah:

1. Diri Sendiri

Pencegahan oleh diri remaja dapat dimulai dengan mengembangkan budaya relasi yang positif, berkontribusi menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying, ikut membantu teman yang menjadi korban, stop bullying, saling mendukung satu sama lain, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya, dan merangkul teman yang menjadi korban bullying.

2. Keluarga

Pencegahan dari keluarga dapat dimulai dengan membangun komunikasi antara anak dan orang tua, memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah, sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua, menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak, menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah, melaporkan kepada sekolah jika korban menjadi anak, memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah.

3. Sekolah

Pencegahan oleh sekolah dapat dilakukan dengan adanya layanan pengaduan kekerasan/ media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya, bekerjasama dan berkomunikasi aktif antara peserta didik, orang tua, dan guru (3 pilar SRA), kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan peserta didik, memberikan bantuan bagi peserta didik yang menjadi korban, pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan, program anti bullying di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat/lingkungan sekitar satuan pendidikan, dan memastikan sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying.

4. Masyarakat

Pencegahan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi, bekerjasama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan, bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan, dan bersama dengan satuan pendidikan memberikan bantuan pada peserta didik yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder terkait.

5. Pemerintah Pusat

Pencegahan oleh pemerintah pusat dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait Permendikbud 82 Tahun 2015 sampai pada level bawah diikuti dengan penerbitan KIE, sosialisasi kebijakan Satuan pendidikan ramah anak dan Konvensi Hak Anak pada satuan pendidikan, melakukan movev dengan membentuk lembaga layanan atau call center pengaduan, dan melakukan koordinasi antar K/L yang memiliki kebijakan atau program berbasis sekolah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap perundungan/bullying.

Daftar Referensi

- Gretchen Brion-Meisels, B., Bishop, S., & Duggins-Clay, P. (2024). *Literature Review-Bullying And Harassment In Schools Literature Review*.
- Hymel, S., & Swearer, S. M. (2015). Four Decades Of Research On School Bullying: An Introduction. *American Psychologist*, 70(4), 293–299. <https://doi.org/10.1037/A0038928>
- Lestari, S., Yusmansyah, Y., & Mayasari, S. (2018). *Bentuk Dan Faktor Penyebab Perilaku Bullying Forms And Factors Causing Bullying Behavior*.
- Rahmatillah, W., Maryamah, M., Isnata, R., Jayatri, T., Wulandari, S., & Siltawani, A. (2024). STUDI KASUS BULLYING DI SEKOLAH: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SISWA SEBAGAI PEMICU BULLYING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN. *Jurnal Ilmiah PGSD Fkip Universitas Mandiri*, 10.
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. (2021). *STOP Perundungan/ Bullying Yuk!* Direktorat Sekolah Dasar. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>
- Tri Herdiani, R., Sugarni, M., Shoufiah, R., Islamarida, R., Fransiska, R., Kurniasih, W., Liza, R. G., Bahriyah, F., Setiyani, A., Rasdianah, N., & Realita, F. (2025). *KESEHATAN MENTAL REMAJA* (T. Marlina & I. Hafizah, Eds.). CV. Eureka Media Aksara.
- Wadesango, N. (2022). Causes And Effects Of Bullying In Schools. *International Journal Of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)*, 14(08), 2022. <https://doi.org/10.9756/INTJECSE/V14I8.6>



Perundungan pada remaja. (Sumber: kompasiana.com)

STOP

PERUNDUNGAN

Perundungan bukan
candaan.
Perundungan
menyakiti.

Hargai perbedaan,
dukung teman
yang
membutuhkan

Jadilah bagian dari
perubahan. Katakan
TIDAK pada
perundungan.



KARTU KELUARGA

Satu Dokumen, Sejuta Manfaat

Penulis : Wardhani, S.P., M.P. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor



Ilustrasi kartu keluarga. (Sumber: jurnallugas.com)

K enurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen resmi negara yang memuat data lengkap mengenai susunan, hubungan, dan identitas seluruh anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Kartu Keluarga bukan sekadar lembaran kertas atau file digital yang tersimpan di ponsel. KK adalah fondasi administrasi kependudukan yang menjadi dasar berbagai layanan publik yang berfungsi:

- Identitas resmi keluarga
- Dasar penerbitan KTP-el
- Syarat pendaftaran layanan pendidikan
- Syarat akses layanan kesehatan
- Akses bantuan sosial
- Dasar perencanaan pembangunan pemerintah

Tanpa Kartu Keluarga yang valid dan mutakhir, berbagai layanan publik dapat terhambat, mulai dari urusan sekolah anak hingga pengajuan bantuan sosial.

Karena itu, memastikan data dalam KK selalu benar dan terbaru bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk perlindungan hak setiap anggota keluarga.

**PASTIKAN DATA DALAM KARTU
KELUARGA SELALU BENAR DAN TERBARU
UNTUK MEMASTIKAN PERLINDUNGAN
HAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA**

Mengapa Kartu Keluarga Sangat Dibutuhkan?

Bayangkan satu dokumen yang menjadi kunci hampir semua urusan penting dalam kehidupan keluarga Anda.

Dari anak masuk sekolah, berobat ke rumah sakit, hingga mengurus bantuan sosial, yang semuanya bermula dari Kartu Keluarga (KK). KK bukan hanya arsip yang disimpan di map plastik. Ia adalah “pintu masuk” seluruh administrasi kependudukan. Karena dari KK-lah data dasar setiap anggota keluarga tercatat dan diakui negara.

Data tersebut menjadi rujukan untuk :

- Penerbitan KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak
- Pendaftaran sekolah sesuai domisili
- Kepesertaan BPJS Kesehatan
- Pengajuan bantuan sosial
- Administrasi perbankan dan kredit
- Pengurusan paspor dan dokumen hukum
- Pencatatan pernikahan dan kelahiran

Semua layanan itu saling terhubung melalui sistem data kependudukan nasional. Artinya, ketika data di KK benar dan mutakhir, proses pelayanan menjadi cepat dan lancar. Namun jika data tidak sesuai atau belum diperbarui, dampaknya bisa merembet ke mana-mana.

Seperti Anak bisa terkendala saat mendaftar sekolah, Bantuan sosial bisa tertunda, Pengurusan dokumen penting bisa terhambat. Satu kesalahan kecil dalam KK dapat berdampak besar pada hak dan layanan keluarga. Karena itu, Kartu Keluarga bukan sekadar dokumen administratif. Menjadi fondasi perlindungan hak, akses layanan, dan kepastian hukum bagi setiap anggota keluarga.

Mengapa Data KK Harus Diupdate?

Kehidupan keluarga selalu bergerak. Hari ini mungkin bertambah anggota baru karena kelahiran, esok bisa saja ada perubahan alamat, pekerjaan, atau status perkawinan. Setiap peristiwa penting itu bukan hanya cerita dalam keluarga, tetapi juga bagian dari data resmi negara yang harus dicatat.

Data kependudukan bersifat dinamis. Artinya, setiap perubahan wajib segera dilaporkan agar Kartu Keluarga tetap akurat dan sah secara administratif.

Perubahan yang harus segera diperbarui antara lain:

- Kelahiran anak
- Kematian anggota keluarga
- Pernikahan
- Perceraian
- Pindah alamat
- Perubahan pekerjaan
- Perubahan tingkat pendidikan
- Perubahan status kewarganegaraan

Sering kali pembaruan dianggap sepele dan bisa ditunda. Padahal, keterlambatan memperbarui data bisa berdampak luas.

KK baiknya cepat di Update ketika ada perubahan karena data kependudukan sudah terintegrasi secara nasional dan digunakan oleh berbagai instansi. Satu data yang tidak sesuai dapat memengaruhi banyak layanan sekaligus. Data yang tidak diperbarui dapat menyebabkan, sebagai berikut :

- Bantuan sosial tidak tepat sasaran
- Kendala saat pendaftaran sekolah
- Hambatan dalam layanan kesehatan
- Ketidaksesuaian data pajak dan administrasi lainnya
- Masalah dalam proses perbankan atau pengurusan dokumen hukum

Bayangkan jika anggota keluarga yang telah meninggal dunia masih tercatat aktif dalam Kartu Keluarga. Data tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam sistem bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga administrasi perbankan. Bahkan dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memicu persoalan hukum karena data dianggap tidak valid.

Sebaliknya, apabila anak yang baru lahir belum segera dimasukkan ke dalam KK, ia belum tercatat secara administratif sebagai bagian dari keluarga. Dampaknya, pengurusan akta kelahiran, kepesertaan BPJS, hingga pendaftaran sekolah di kemudian hari bisa mengalami hambatan.

Karena itu, setiap melakukan pembaruan Kartu Keluarga, pastikan seluruh data yang dicantumkan sudah benar dan sesuai dengan dokumen dasar, terutama nama. Penulisan nama harus konsisten dan mengacu pada data di akta kelahiran sebagai dokumen awal. Perbedaan satu huruf saja dapat menyebabkan ketidaksesuaian data di sistem, dan berpotensi menyulitkan saat mengurus dokumen lain seperti KTP-el, ijazah, paspor, sertifikat atau dokumen perbankan. Kesalahan kecil dalam penulisan nama hari ini bisa berdampak panjang di masa depan. Maka, sebelum mencetak atau menyetujui KK yang baru, periksa kembali :

- Ejaan nama sudah benar
- Tidak ada singkatan yang berbeda
- Tidak ada tambahan atau pengurangan huruf
- Sesuai dengan akta kelahiran dan dokumen resmi lainnya

Data yang konsisten adalah kunci administrasi yang aman dan lancar. Memperbarui KK bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab untuk melindungi hak seluruh anggota keluarga.

DATA YANG AKURAT HARI INI ADALAH JAMINAN LAYANAN YANG LANCAR ESOK HARI

Manfaat KK yang Akurat bagi Pemerintah

Kartu Keluarga bukan hanya penting bagi setiap rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Di balik satu lembar KK, tersimpan data strategis yang sangat menentukan arah kebijakan.

Data dalam KK membantu pemerintah untuk:

1. Menentukan jumlah penduduk per wilayah. Data ini menjadi dasar mengetahui berapa jumlah warga di tingkat RT, kelurahan, kecamatan, hingga kota.
2. Menghitung kebutuhan sekolah dan fasilitas kesehatan. Dari data usia dan jumlah anak, pemerintah dapat memperkirakan kebutuhan ruang kelas, guru, puskesmas, tenaga medis, dan layanan lainnya.

3. Menentukan kuota bantuan social. Bantuan yang tepat sasaran hanya dapat diberikan jika data keluarga akurat dan mutakhir.
4. Perencanaan pembangunan. Pembangunan jalan, perumahan, sanitasi, hingga program pemberdayaan ekonomi mengacu pada data kependudukan yang valid.
5. Penyusunan anggaran daerah. Jumlah penduduk dan kondisi sosial ekonomi sangat memengaruhi alokasi anggaran pemerintah.

Dengan kata lain, satu data yang tidak diperbarui bisa memengaruhi perhitungan besar dalam kebijakan publik.

Kartu Keluarga bukan sekadar dokumen keluarga yang disimpan di rumah. Ia adalah bagian dari sistem data nasional yang menjadi dasar keputusan penting pemerintah. Data keluarga yang akurat bukan hanya melindungi hak pribadi, tetapi juga membantu mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Elemen-Elemen Data dalam Kartu Keluarga

Bukan Sekadar Tulisan, Tapi Penentu Hak. Sekilas, Kartu Keluarga mungkin terlihat seperti deretan nama dan angka. Namun di balik setiap kolom yang tercetak, tersimpan informasi penting yang menentukan akses layanan, perlindungan hukum, hingga hak sosial setiap anggota keluarga.

Setiap elemen dalam KK memiliki fungsi yang saling terhubung dalam sistem administrasi nasional. Karena itu, memahami isi KK sama pentingnya dengan memilikinya.

Setiap elemen dalam Kartu Keluarga memiliki fungsi strategis dalam sistem administrasi nasional, sebagai berikut :

1. Nomor Kartu Keluarga (No. KK) adalah identitas unik satu keluarga dalam sistem negara. Nomor ini menjadi “kode utama” yang menghubungkan data keluarga dengan berbagai layanan publik.
2. Nama Kepala Keluarga menunjukkan penanggung jawab administrasi keluarga dan menjadi rujukan dalam berbagai pengurusan dokumen.

3. Alamat lengkap beserta RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi menentukan domisili resmi. Data ini sangat penting untuk menentukan wilayah pelayanan, sekolah zonasi, bantuan sosial, hingga hak pilih dalam pemilu.
4. NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah identitas tunggal setiap penduduk yang berlaku seumur hidup. Dari NIK inilah diterbitkan KTP-el, didaftarkan ke BPJS, digunakan dalam perbankan, perpajakan, hingga pendidikan.
5. Nama lengkap bukan sekadar panggilan. Penulisan harus konsisten dan sesuai dengan akta kelahiran. Perbedaan satu huruf saja bisa menimbulkan kendala saat mengurus ijazah, paspor, atau dokumen hukum lainnya.
6. Tempat dan tanggal lahir menentukan usia seseorang, yang berpengaruh pada hak pendidikan, hak politik, hingga program bantuan berbasis umur.
7. Jenis kelamin dicantumkan sebagai bagian dari identitas dasar penduduk yang digunakan untuk kebutuhan klasifikasi administrasi serta penyusunan berbagai layanan publik yang berbasis gender.
8. Golongan darah sering kali dianggap sepele, padahal sangat penting dalam kondisi darurat medis.
9. Hubungan dalam keluarga (kepala keluarga, istri, anak, dan seterusnya) menjelaskan struktur serta tanggungan dalam satu rumah tangga. Data ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dalam berbagai kebijakan sosial. Selain itu, dalam aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB), status hubungan dalam KK menjadi salah satu rujukan utama. Anak yang tercatat dengan hubungan sebagai anak kandung atau anak sah dalam Kartu Keluarga biasanya lebih diutamakan dalam proses verifikasi administrasi, terutama untuk memastikan kesesuaian domisili dan keabsahan data keluarga. Karena itu, memastikan kolom hubungan dalam keluarga terisi dengan benar dan sesuai kondisi sebenarnya sangat penting agar tidak menimbulkan kendala saat mengurus layanan pendidikan maupun program sosial lainnya.
10. Status perkawinan, merupakan elemen penting dalam Kartu Keluarga yang menentukan hak dan kewajiban hukum seseorang dalam keluarga. Data ini menunjukkan apakah seseorang berstatus belum kawin, kawin tercatat/tidak tercatat, cerai hidup tercatat/tidak tercatat, atau cerai mati. Status perkawinan sangat berkaitan dengan hak waris. Dalam pembagian harta warisan, status sebagai suami, istri, atau mantan pasangan akan memengaruhi kedudukan hukum dan bagian yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesalahan atau ketidaksesuaian data status perkawinan dalam KK dapat menimbulkan sengketa atau hambatan dalam proses administrasi waris. Selain itu, saat mengurus akta kematian, status perkawinan almarhum/almahum juga menjadi data penting. Informasi ini digunakan untuk memastikan keabsahan pasangan yang ditinggalkan dan menjadi dasar dalam penerbitan dokumen lanjutan, seperti pembaruan KK, klaim asuransi, dana pensiun, maupun administrasi perbankan. Karena itu, perubahan status perkawinan akibat pernikahan, perceraian, maupun kematian pasangan harus segera diperbarui dalam Kartu Keluarga agar hak-hak hukum setiap anggota keluarga tetap terlindungi secara sah.
11. Agama merupakan salah satu elemen identitas dalam Kartu Keluarga yang berperan penting dalam layanan pencatatan sipil, khususnya terkait peristiwa perkawinan dan perceraian. Di Indonesia, perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Karena itu, dalam praktik administrasi kependudukan, pasangan yang menikah umumnya memiliki agama yang sama agar perkawinannya dapat dicatatkan secara resmi oleh negara. Data agama yang tercantum dalam Kartu Keluarga menjadi dasar dalam proses pencatatan pernikahan, penerbitan akta perkawinan, serta pembaruan dokumen kependudukan lainnya. Oleh sebab itu, pastikan penulisan agama dalam KK sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan konsisten dengan dokumen resmi yang dimiliki.

12. Pendidikan dan pekerjaan menjadi dasar perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan ketenagakerjaan. Pendidikan dan pekerjaan bukan sekadar data pelengkap dalam Kartu Keluarga. Keduanya menjadi indikator penting dalam membaca kondisi sosial dan ekonomi suatu keluarga. Data pendidikan membantu pemerintah memetakan tingkat kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Mulai dari jumlah penduduk usia sekolah hingga tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Informasi ini menjadi dasar dalam merancang program peningkatan kompetensi, pelatihan keterampilan, serta pemerataan akses pendidikan. Sementara itu, jenis pekerjaan memberikan gambaran kondisi ekonomi keluarga. Data ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, program pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan sosial. Bahkan dalam beberapa program bantuan sosial, jenis pekerjaan dapat menjadi salah satu indikator penilaian. Misalnya, warga dengan pekerjaan sebagai buruh harian lepas, pekerja informal, atau tidak memiliki pekerjaan tetap, dapat masuk dalam kategori prioritas tertentu sesuai kriteria program yang berlaku. Karena itu, memastikan data pendidikan dan pekerjaan di KK terisi dengan benar dan sesuai kondisi sebenarnya sangat penting. Data yang akurat akan membantu pemerintah merancang kebijakan yang tepat sasaran dan memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.

13. Kewarganegaraan dalam Kartu Keluarga menegaskan status hukum seseorang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Data ini sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban seseorang di mata hukum negara. Status kewarganegaraan berpengaruh pada berbagai aspek, seperti hak politik, kepemilikan dokumen identitas, akses layanan publik, hingga ketentuan keimigrasian. Bagi WNI, data kewarganegaraan menjadi dasar penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP-el dan paspor Indonesia. Sementara bagi WNA yang tercatat dalam KK, status tersebut

berkaitan dengan izin tinggal dan administrasi keimigrasian yang berlaku. Karena itu, pencantuman kewarganegaraan dalam KK harus sesuai dengan dokumen resmi yang sah, agar tidak menimbulkan kendala dalam proses administrasi maupun pelayanan publik di kemudian hari.

14. Nama orang tua berfungsi sebagai validasi garis keturunan dan pendukung Nama orang tua dalam Kartu Keluarga berfungsi sebagai validasi garis keturunan dan menjadi data pendukung dalam berbagai dokumen hukum, seperti akta kelahiran. Informasi ini memastikan hubungan perdata antara anak dan orang tua tercatat secara sah dalam sistem administrasi negara. Selain itu, data nama orang tua juga memiliki peran penting dalam urusan hak waris. Dalam proses pembagian warisan, kejelasan hubungan anak dengan orang tua menjadi dasar penentuan ahli waris yang sah. Ketidaksesuaian atau kesalahan penulisan nama dapat menimbulkan hambatan administratif, bahkan berpotensi memicu sengketa hukum. Pastikan penulisan nama orang tua dalam KK harus benar, lengkap, dan konsisten dengan dokumen resmi lainnya, agar hak-hak hukum setiap anggota keluarga tetap terlindungi.

Semua elemen ini bukan berdiri sendiri. Mereka membentuk satu sistem data yang saling terhubung, ketika satu data tidak sesuai atau tidak diperbarui, dampaknya bisa meluas, seperti :

- Anak yang belum tercatat bisa kesulitan mendaftar sekolah.
- Anggota keluarga yang telah meninggal dunia namun belum dihapus dari Kartu Keluarga dapat menimbulkan masalah administrasi. Selain memengaruhi akurasi data bantuan sosial, status yang masih aktif juga dapat berdampak pada kepesertaan dan tagihan BPJS Kesehatan, karena sistem masih mencatatnya sebagai peserta. Status perkawinan yang belum diperbarui bisa menghambat urusan hukum.
- Alamat yang tidak sesuai dapat membuat layanan ditolak.

Kartu Keluarga bukan sekadar dokumen administrasi. Ia adalah peta identitas keluarga dalam sistem negara. Data yang akurat hari ini adalah jaminan hak yang terlindungi di masa depan.

Setelah memahami betapa pentingnya setiap elemen dalam Kartu Keluarga — mulai dari nama, status perkawinan, hubungan keluarga, hingga pekerjaan dan kewarganegaraan — kini kita menyadari satu hal: data yang akurat adalah perlindungan bagi keluarga.

Setiap perubahan dalam keluarga bukan hanya peristiwa pribadi, tetapi juga peristiwa hukum yang perlu dicatat. Jangan menunggu sampai muncul kendala saat mengurus sekolah, bantuan sosial, BPJS, perbankan, atau dokumen lainnya.

Kabar baiknya, memperbarui Kartu Keluarga itu:

- Gratis
- Prosesnya mudah (Online/off line)
- Cepat dilayani (prima antri dan pakua prima)
- Dapat dilakukan di Disdukcapil setempat (di Kelurahan, kecamatan, MPP, kantor disdukcapil)

Laporkan setiap perubahan maksimal 14 hari setelah terjadi peristiwa kependudukan agar data tetap sinkron dalam sistem nasional. Karena pada akhirnya :

- Data akurat mempercepat layanan
- Data valid melindungi hak
- Administrasi tertib menjaga ketenangan keluarga

MARI BERSAMA MENJADI KELUARGA YANG SADAR ADMINISTRASI, KARENA TERTIB DATA HARI INI ADALAH JAMINAN KEPASTIAN HAK DI MASA DEPAN.



Potret keluarga di Indonesia. (Sumber: canva.com)

Kota Bogor Menduniakan Halal dan Asuh (Aman Sehat Utuh dan Halal) :

SI RUSA BUBULAK

(Sistem Informasi Rumah
Sembelih Sapi untuk Ibu-
Ibu Melek Asuh dan
Kesejahteraan Hewan)

Penulis : Drh. Saptina Aryani, Setiawan AMd, dan tim -
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor

Beberapa waktu silam, sebuah perbincangan menarik muncul di sebuah grup media sosial perkumpulan ibu - ibu. Seorang ibu bercerita bahwa suatu hari dia tidak jadi membeli ayam bakar utuh (tidak dipotong – potong) karena dilihatnya leher ayam tersebut hanya robek sedikit di lokasi dimana sayatan sembelihan berada. Sang ibu meragukan kehalalan dari ayam yang tidak jadi dibeli tersebut. Rupanya cerita tersebut menarik perhatian banyak anggota grup yang notabene isinya ibu-ibu semua. Ada yang berterima kasih karena telah diingatkan untuk memperhatikan halal haram suatu produk asal hewan. Tetapi ada pula yang kontra dan berkomentar si Ibu yang bersangkutan jangan berprasangka buruk dong karena hal itu malah merugikan si pedagang. Terlepas apapun pro kontra yang terjadi yang biasanya berakhir dengan makan bakso bersama di warung bakso, banyaknya komentar yang menanggapi menunjukkan bahwa masalah halal haram suatu produk asal hewan telah menjadi hal yang disadari banyak orang, khususnya para ibu yang menjadi



Foto pedagang daging sapi. (Sumber: canva.com)

enentu gizi yang akan diberikan ke keluarganya. Tidak hanya dari segi jenis produk yang dipilih, namun termasuk juga didalamnya proses yang dilakukan untuk menjaga kehalalan dari suatu produk asal hewan. Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil'Alamin telah mengatur kehidupan umatnya, mencakup seluruh bidang kehidupan, tidak hanya dari sudut pandang ibadah, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting umat Islam. (Lya, 2023). Termasuk diantaranya penitngnya memilih makanan yang memenuhi persyaratan halalan thoyibban. Kementerian Keuangan memaparkan bahwa dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia berada di posisi peringkat tiga ekonomi Syariah. SGIE merupakan proses Pelaporan Status Ekonomi Islam Dunia. Saat ini komoditas halal menjadi tren di semua kalangan, kehadiran produk dengan sertifikasi/label halal sangat penting, karena akan meningkatkan daya saing ekonomi syariah negara Indonesia di pasar global. Kedepan diharapkan Bangsa Indonesia dapat memimpin dan berada di posisi teratas, hal ini di karenakan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berangkat dari keberadaan kota Bogor yang cukup di kenal sebagai Kota Wisata dan pusat Kuliner di Indonesia untuk itu diperlukan kepedulian dari semua pihak agar Kota Bogor dapat membuka jendela dunia dengan Produk Halal dan ASUH nya.

Kenapa Harus Halal? Dan Kenapa Harus ASUH?

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan penting umat islam, kita harus berupaya semaksimal mungkin dan lebih peduli terhadap apa yang di butuhkan tersebut yaitu terkait kehalalan produk- produk. Cara yang paling mudah yaitu kita harus lebih peka dan aktif pada saat akan membeli kebutuhan kebutuhan sehari-hari dengan melihat, mencari dan menanyakan keberadaan label halal dari setiap produk tersebut.

**PRODUK YANG KITA BELI DAN AKAN KITA
KONSUMSI APAKAH TERMASUK :
“PRODUK HALAL” ATAUKAH “NON HALAL”**

Saad bin Abi Waqash berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku orang yang diijabah doanya”. Nabi Muhammad bersabda: Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh seseorang yang memasukkan satu suapan haram dalam perutnya maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari, dan sungguh hamba yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram dan riba maka api lebih utama untuknya Secara bahasa, Halal berarti arihalla (حل) yang berarti kebebasan, kebebasan, dan merupakan lawan kata dari aqदन (عقد) yang berarti terikat.

Untuk itu Si Rusa Bubulak hadir sebagai upaya untuk mengingatkan dan mengajak semua umat islam untuk kembali berfikir tentang betapa pentingnya membeli dan mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan sehari hari yang telah berlabel Halal.

ASUH (Aman Sehat Utuh dan halal) prinsip konsumen Islam yang masih dikaitkan dengan prinsip halal adalah kebersihan dan kesehatan. Al-Quran mengingatkan manusia untuk memakan makanan baik yang telah Allah sediakan bagi mereka. Makanan yang baik adalah makanan yang bersih, menyehatkan, dan tidak membahayakan tubuh maupun pikiran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut, termasuk firman Allah SWT. Artinya: “Oleh karena itu, makanlah yang halal dan baik (tayyib) dari antara makanan yang telah Allah sediakan, dan jika kamu melakukannya, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikannya.” (QS. An-Nahl 16:114).



Foto daging sapi. (Sumber: canva.com)

Dalam penerapan ASUH, penekanan lebih kepada kebutuhan kebutuhan umat islam sehari-hari yang berasal dari protein hewani seperti Daging (sapi, ayam, kambing domba), telur, susu dan produk hewani lainnya. Kebutuhan akan produk produk asal hewan akan meningkat pada momen-momen hari-hari besar islam seperti idul fitri dan idul adha. Pengawasan akan meningkat dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor bekerjasama dengan Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan Mahasiswa serta mahasiswi dari kampus yang berada di wilayah Kota Bogor seperti Institut Pertanian bogor dan Polbangtan. Salah satu pengawasan dalam penerapan ASUH pada mata rantai produk makanan yaitu pada saat Idul Adha, karena di sana ada kegiatan pemotongan hewan qurban yang di laksanakan mandiri oleh masyarakat. Dan di saat itulah pengawasan dalam penerapan ASUH harus dilaksanakan.

Penerapan dan pengawasan ASUH yang di ilustrasikan kami dari SI Rusa Bubulak seperti pada kegiatan pemotongan hewan yang dilaksanakan di tengah masyarakat seperti di masjid-masjid dan mushola. Yang menjadi titik kritis kegiatan pemotongan hewan qurban tersebut adalah Kehalalan dan Kesejahteraan Hewan. Penerapan Kesejahteraan hewan dilaksanakan mulai dari hewan berada di kandang, kandang tempat penjualan hewan, ebelum penyembelihan sampai dengan proses penyembelihan. Beberapa contoh edukasi kepada masyarakat yaitu tentang .

penyembelihan halal dan penerapan kesejahteraan hewan seperti hewan harus di istirahatkan sebelum di sembelih, hewan harus sehat, menjatuhkan hewan harus dengan penerapan animale walfare, setelah di rebahkan hewan harus segera di sembelih, agar penyembelihan sempurna titik/lokasi penyembelihan 5 jari dari rahang untuk hewan sapi/kerbau, di sembelih dengan pisau yang tajam (hasil penyembelihan hayatan mustakhiroh), pengecekan hasil sembelihan apakah sudah terpotong ketiga saluran, pemeriksaan kesempurnaan kematian, proses selanjutnya dengan syarat syarat ASUH.

Metode

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan, menjelaskan serta mendeskripsikan dengan kritis serta menggambarkan karakteristik dari dari suatu populasi atau fenomena kejadian di masyarakat guna menyelidiki dampak inovasi terhadap perkembangan produk halal dan ASUH terhadap daya saing produk.

Inovasi SI Rusa Bubulak ingin membersamai Kota Bogor menduniakan Halal dan ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal, dengan menggunakan teknologi modern dan standar kualitas internasional yang di kombinasikan dengan sertifikasi halal yang terpercaya akan meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat dan membuka akses pasar yang lebih luas baik domestik atau global. Sehingga hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Syariah di Kota Bogor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

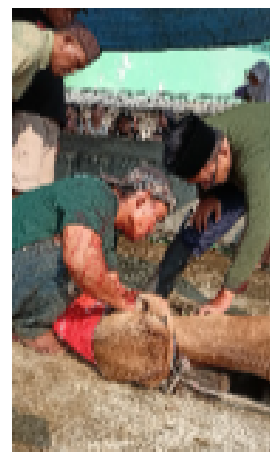
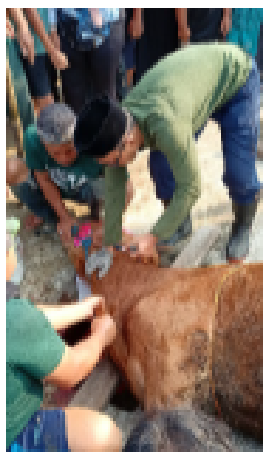


Foto inovasi SI Rusa Bubulak.

LOKER BERES

Layanan Online Kependudukan Kelurahan Berintegritas, Efektif, Responsif, Efisien, Sederhana Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk Menuju Bogor Beres

■ Penulis : Wardhani, S.P., M.P. dan Mugi Lastono, S.Sos.- Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor



Diskusi bersama Wali Kota Bogor. (Sumber: megapolitan.antaranews.com)

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah.

Pelayanan publik tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada mekanisme konvensional yang menuntut kehadiran fisik masyarakat di kantor pelayanan. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan dinamis, pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital. Dalam konteks tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memandang bahwa transformasi pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan mendesak.

Administrasi kependudukan bukan hanya persoalan dokumen seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, atau KIA, tetapi menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan, validasi bantuan sosial, perencanaan pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan fiskal daerah. Sebagai bagian dari upaya mendukung visi Kota Bogor “Bogor Beres, Bogor Maju”, lahirlah inovasi strategis bertajuk:

LOKER BERES (Layanan Online Kependudukan Kelurahan Berintegritas, Efektif, Responsif, Efisien, dan Sederhana).

Program ini merupakan aksi perubahan untuk mentransformasi pelayanan dari model sentralistik menjadi model desentralistik berbasis digital di tingkat kelurahan.

Konteks Demografis dan Tantangan Kota Bogor

Kota Bogor sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,1 juta jiwa yang tersebar di 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Mobilitas penduduk yang tinggi, termasuk arus migrasi masuk, menuntut sistem administrasi kependudukan yang adaptif dan akurat.

Tingginya angka pindah datang penduduk setiap tahun memperlihatkan bahwa Kota Bogor menjadi magnet ekonomi, pendidikan, dan hunian. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan, baik untuk pembuatan dokumen baru maupun pembaruan data.

Namun demikian, pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya volume permohonan yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan yang tersedia. Tingginya angka migrasi masuk dan mobilitas penduduk menyebabkan kebutuhan penerbitan serta pembaruan dokumen kependudukan terus bertambah setiap tahun. Kondisi ini berdampak pada penumpukan antrean di kantor pelayanan, terutama pada periode tertentu seperti awal tahun ajaran baru, menjelang pemilu, maupun saat pembaruan data bantuan sosial.

Selain itu, model pelayanan yang masih dominan terpusat di kantor utama menyebabkan distribusi beban kerja belum merata. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat belum sepenuhnya berfungsi sebagai simpul pelayanan digital. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tetap datang langsung ke kantor pusat meskipun beberapa layanan telah tersedia secara daring.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kesenjangan literasi digital masyarakat. Tidak semua warga memiliki kemampuan atau akses perangkat yang memadai untuk memanfaatkan layanan online secara mandiri.

Hal ini menimbulkan ketergantungan pada layanan tatap muka dan memperlambat proses transformasi digital. Dari sisi internal organisasi, peningkatan jumlah permohonan berimplikasi pada meningkatnya beban verifikasi dan validasi data.

Tanpa sistem distribusi pelayanan yang efektif, risiko keterlambatan penyelesaian dokumen serta potensi kesalahan administrasi menjadi lebih besar.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menambah kapasitas layanan, tetapi juga melakukan perubahan sistemik

melalui digitalisasi dan desentralisasi pelayanan agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan inovatif untuk menjembatani kebutuhan pelayanan yang meningkat dengan kapasitas pelayanan yang tersedia.



Kota Bogor. (Sumber: canva.com)

Urgensi Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan bukan sekadar respons terhadap perkembangan teknologi, melainkan sebuah kebutuhan struktural dalam tata kelola pemerintahan modern. Perubahan pola interaksi masyarakat yang semakin cepat, dinamis, dan berbasis digital menuntut pemerintah untuk menghadirkan sistem pelayanan yang adaptif, efisien, dan terintegrasi. Administrasi kependudukan memiliki posisi strategis sebagai fondasi data pembangunan. Dokumen dan data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas hukum warga negara, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan program bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, perencanaan anggaran, hingga penyusunan kebijakan publik. Oleh karena itu, pengelolaan yang lambat dan manual berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap kualitas kebijakan daerah.

Digitalisasi menghadirkan sejumlah keunggulan strategis, antara lain:

1. Efisiensi Proses

Sistem digital mampu memangkas tahapan manual yang sebelumnya memerlukan waktu lebih panjang, seperti pengisian formulir fisik, verifikasi berkas berulang, dan distribusi dokumen secara konvensional. Dengan proses berbasis sistem, waktu pelayanan dapat dipersingkat secara signifikan, sekaligus meningkatkan produktivitas aparatur.

2. Transparansi

Melalui sistem daring, setiap tahapan proses pelayanan dapat dipantau secara real-time. Masyarakat memperoleh kepastian mengenai status permohonan dokumen, sementara pimpinan dapat melakukan monitoring kinerja secara lebih terukur. Transparansi ini turut memperkuat akuntabilitas pelayanan publik.

3. Akurasi Data

Digitalisasi mengurangi risiko kesalahan akibat input manual yang berulang. Validasi berbasis sistem membantu memastikan konsistensi data, sehingga kualitas basis data kependudukan menjadi lebih andal. Data yang akurat merupakan prasyarat utama bagi kebijakan berbasis bukti.

Pelayanan Disdukcapil Kota Bogor. (Sumber: detik.com)



4. Integrasi Sistem

Data kependudukan yang terdigitalisasi memungkinkan integrasi lintas sektor. Informasi dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah lain untuk mendukung program pembangunan secara lebih tepat sasaran. Integrasi ini juga mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi antarinstansi.

5. Ketahanan Layanan

Pengalaman situasi darurat, seperti pandemi, menunjukkan pentingnya sistem pelayanan yang tidak sepenuhnya bergantung pada tatap muka. Digitalisasi memungkinkan pelayanan tetap berjalan meskipun terjadi pembatasan mobilitas, sehingga hak administratif masyarakat tetap terpenuhi.

Dengan demikian, digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis data. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, digitalisasi tidak dapat hanya dilakukan di tingkat pusat pelayanan. Layanan harus hadir lebih dekat kepada masyarakat. Di sinilah LOKER BERES mengambil peran strategis.

Konsep dan Desain LOKER BERES

LOKER BERES dirancang sebagai model transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital yang diimplementasikan di tingkat kelurahan. Inovasi ini berangkat dari kebutuhan untuk mendesentralisasikan pelayanan yang sebelumnya terpusat, sehingga akses masyarakat terhadap layanan adminduk menjadi lebih mudah, cepat, dan merata.

Konsep utama LOKER BERES adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat tanpa mengurangi kualitas, akurasi, dan integritas data. Pendekatan ini memadukan digitalisasi sistem dengan pemberdayaan kelembagaan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Secara desain, LOKER BERES dibangun melalui beberapa komponen utama, sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur layanan online di kelurahan. Setiap kelurahan percontohan dilengkapi dengan perangkat pendukung dan akses sistem yang terhubung langsung dengan basis data Disdukcapil. Infrastruktur ini memastikan bahwa proses pengajuan, verifikasi, hingga pengiriman berkas dapat dilakukan secara digital tanpa harus memindahkan dokumen secara manual.
2. Penunjukan operator layanan. Operator kelurahan memiliki peran strategis sebagai fasilitator masyarakat dalam mengakses layanan digital. Mereka tidak hanya bertugas menginput dan memverifikasi berkas, tetapi juga memberikan pendampingan bagi warga yang memiliki keterbatasan literasi digital. Dengan demikian, inovasi ini tetap inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan.
3. Integrasi sistem dengan Disdukcapil. Seluruh proses pelayanan terhubung secara langsung dengan sistem pusat, sehingga validasi data tetap berada dalam kendali otoritatif. Integrasi ini menjaga konsistensi dan keamanan data kependudukan sekaligus mempercepat proses administrasi.
3. Monitoring berbasis dashboard. Sistem dilengkapi dengan fitur pemantauan yang memungkinkan pimpinan memonitor jumlah permohonan, waktu penyelesaian, serta kinerja layanan secara real-time. Dashboard ini menjadi instrumen penting dalam evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data.
4. Standarisasi SOP dan modul pelatihan. Untuk menjaga kualitas pelayanan yang seragam, disusun standar operasional prosedur serta modul pelatihan bagi operator. Standarisasi ini memastikan bahwa meskipun pelayanan tersebar di berbagai kelurahan, kualitas dan integritas proses tetap terjaga.

Melalui desain tersebut, kelurahan tidak lagi sekadar menjadi unit administrasi kewilayahan, tetapi bertransformasi menjadi simpul pelayanan administrasi kependudukan yang aktif, responsif, dan terintegrasi secara digital. Transformasi ini memperkuat peran kelurahan sebagai representasi kehadiran negara yang paling dekat dengan masyarakat.

Implementasi LOKER BERES dilakukan secara bertahap guna memastikan stabilitas sistem dan kesiapan sumber daya. Tahap awal dimulai dengan penetapan enam kelurahan percontohan sebagai pilot project. Evaluasi berkala terhadap tahap percontohan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah kelurahan di Kota Bogor.

Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa LOKER BERES tidak hanya dirancang sebagai inovasi jangka pendek, tetapi sebagai model pelayanan berkelanjutan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi pemerintahan.

**LOKER BERES MENDEKATKAN LAYANAN
KEPADA MASYARAKAT TANPA
MENGURANGI KUALITAS, AKURASI, DAN
INTEGRITAS DATA**

Tujuan Strategis LOKER BERES

LOKER BERES dirancang dengan tujuan strategis yang berjenjang dan terukur, guna memastikan transformasi pelayanan administrasi kependudukan berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Pendekatan bertahap ini memungkinkan proses implementasi dilakukan secara adaptif, sekaligus memberikan ruang evaluasi dan penyempurnaan di setiap fase pelaksanaan.

Jangka Pendek

Pada tahap awal, fokus utama adalah mempersiapkan fondasi sistem yang kuat, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur teknologi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penyusunan regulasi internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelatihan operator kelurahan, penyediaan serta aktivasi aplikasi layanan online, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari penguatan tahap awal, diberikan dukungan sarana berupa komputer layanan LOKER BERES kepada 10 kelurahan yang secara simbolis menerima perangkat untuk mendukung operasional sekaligus melakukan validasi data kependudukan di tingkat kelurahan. Sepuluh kelurahan tersebut meliputi:

1. Kec. Bogor Selatan – Kel. Mulyaharja
2. Kec. Bogor Timur – Kel. Baranangsiang
3. Kec. Bogor Tengah – Kel. Tegallaga
4. Kec. Bogor Barat – Kel. Sindangbarang
5. Kec. Bogor Utara – Kel. Tegal Gundil
6. Kec. Tanah Sareal – Kel. Mekarwangi
7. Kec. Bogor Barat – Kel. Balumbangjaya
8. Kec. Bogor Utara – Kel. Ciluar
9. Kec. Bogor Selatan – Kel. Rancamaya
10. Kec. Bogor Timur – Kel. Sindangrasa

Penyerahan perangkat ini bukan hanya simbol dukungan sarana, tetapi merupakan langkah konkret dalam memperkuat fungsi kelurahan sebagai simpul pelayanan adminduk berbasis digital. Selain melayani permohonan dokumen, kelurahan juga berperan aktif dalam proses validasi dan pemutakhiran data kependudukan secara lebih akurat dan cepat.

Jangka Menengah

Pada tahap menengah, fokus diarahkan pada peningkatan utilisasi sistem dan optimalisasi fitur layanan. Target utama adalah meningkatnya jumlah pengguna layanan online, berkurangnya ketergantungan pada layanan tatap muka, serta perluasan jenis layanan yang dapat diakses melalui sistem digital.

Selain itu, validitas data migrasi penduduk menjadi perhatian khusus. Dengan keterlibatan aktif kelurahan, proses pencatatan peristiwa kependudukan seperti pindah datang dapat dilakukan lebih cepat, sehingga basis data kependudukan menjadi lebih mutakhir dan reliabel.

Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, LOKER BERES diarahkan untuk mencapai implementasi penuh di seluruh kelurahan di Kota Bogor. Tujuan akhirnya adalah terciptanya sistem pelayanan adminduk yang terintegrasi secara menyeluruh, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin meningkat.

Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu menghasilkan data Lahir, Mati, Pindah, dan Datang (LAMPID) yang akurat, terbaru, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan basis data yang kuat, kebijakan publik dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Dengan demikian, tujuan strategis LOKER BERES tidak hanya bersifat administratif dalam konteks peningkatan pelayanan, tetapi juga berdampak langsung terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis data.

Penguatan Tahap Awal dan Dasar Penentuan Lokasi

Penentuan 10 kelurahan penerima sarana LOKER BERES tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui pertimbangan rasional berbasis kebutuhan pelayanan.

Pelayanan Disdukcapil Kota Bogor. (Sumber: megapolitan.antaranews.com)



Dua indikator utama yang digunakan dalam penetapan lokasi adalah :

1. Letak geografis kelurahan yang relatif jauh dari Kantor Disdukcapil, sehingga masyarakat membutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk mengakses layanan secara langsung.
2. Tingkat kepadatan dan jumlah penduduk yang tinggi, yang berimplikasi pada tingginya volume permohonan dokumen kependudukan.

Dengan pendekatan tersebut, program diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di wilayah dengan tekanan layanan yang tinggi dan akses yang relatif terbatas. Strategi ini juga mencerminkan prinsip keadilan pelayanan (*equitable service delivery*), yakni memprioritaskan wilayah yang memiliki urgensi lebih besar.

Skema Pemberian Sarana LOKER BERES Secara Bertahap

Sebagai bagian dari strategi penguatan infrastruktur layanan, pemberian sarana berupa 1 (satu) set pc komputer layanan LOKER BERES kepada kelurahan dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa ekspansi program tetap berjalan secara terencana, terukur, dan

berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Skema implementasi dirancang berbasis tahunan. Pada Tahun 2025, dialokasikan pengadaan perangkat untuk 6 kelurahan sebagai tahap awal penguatan infrastruktur layanan digital di tingkat kelurahan. Tahap ini difokuskan pada penguatan fondasi sistem, termasuk kesiapan perangkat, akses jaringan, serta peningkatan kapasitas operator. Dalam perencanaan awal, ditargetkan setiap tahun dapat direalisasikan tambahan 6 kelurahan, sehingga perluasan layanan LOKER BERES dapat berjalan secara konsisten dan sistematis hingga mencakup seluruh wilayah.

Namun demikian, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran daerah, pada Tahun 2026 alokasi pengadaan 1 set PC layanan LOKER BERES hanya dapat direalisasikan untuk 4 kelurahan. Penyesuaian ini merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah yang harus direspons secara adaptif.

Meskipun terjadi pengurangan jumlah alokasi dibandingkan rencana awal, komitmen perluasan program tetap dipertahankan melalui strategi bertahap dan berkelanjutan. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi LOKER BERES tetap fleksibel terhadap kondisi fiskal tanpa mengurangi arah kebijakan jangka panjang, yakni pemerataan akses pelayanan adminduk berbasis digital.

Dampak Strategis Pendekatan Bertahap

Pendekatan implementasi secara gradual memiliki sejumlah keunggulan strategis.

1. Memungkinkan dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem sebelum diperluas ke wilayah berikutnya. Evaluasi ini penting untuk memastikan kesiapan teknis maupun administratif.
2. Menjamin kesiapan sumber daya manusia. Operator kelurahan dapat diberikan pendampingan secara optimal sebelum cakupan layanan diperluas, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga.
3. Strategi bertahap memberikan ruang penyesuaian terhadap kapasitas fiskal daerah tanpa mengganggu keberlanjutan program. Stabilitas anggaran tetap terjaga, sementara arah transformasi pelayanan tetap berjalan.
4. Kualitas layanan dapat dipertahankan secara optimal. Ekspansi yang terlalu cepat tanpa kesiapan sistem berisiko menurunkan mutu pelayanan. Dengan pendekatan bertahap, standar pelayanan dapat dijaga tetap konsisten di setiap kelurahan.

Dengan demikian, meskipun terdapat dinamika dalam penganggaran, arah kebijakan LOKER BERES tetap konsisten, yaitu memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital secara merata, inklusif, dan berkeadilan di seluruh wilayah Kota Bogor.

Dampak bagi Masyarakat

Implementasi LOKER BERES membawa perubahan yang nyata dalam pengalaman masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pelayanan, tetapi juga memperbaiki kualitas interaksi antara warga dan pemerintah.

1. Aksesibilitas, masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak yang relatif jauh menuju kantor pusat pelayanan. Dengan hadirnya layanan di tingkat kelurahan, pelayanan menjadi lebih dekat dengan domisili warga. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di wilayah dengan jarak tempuh lebih jauh atau memiliki

keterbatasan mobilitas. Kehadiran layanan di kelurahan memperpendek rantai birokrasi sekaligus mendekatkan kehadiran negara kepada warga.

2. Efisiensi waktu, terjadi penurunan antrean fisik secara signifikan. Distribusi permohonan melalui kelurahan mengurangi kepadatan di kantor pusat, sehingga waktu tunggu pelayanan menjadi lebih singkat. Bagi masyarakat, efisiensi ini berarti penghematan waktu yang sebelumnya terpakai untuk menunggu, serta mengurangi ketidaknyamanan akibat kepadatan ruang pelayanan.
3. Transparansi dan kepastian layanan, sistem berbasis digital memungkinkan masyarakat memantau status dokumen secara lebih jelas. Proses yang sebelumnya sulit dipantau kini menjadi lebih terbuka dan terukur. Transparansi ini mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa percaya terhadap mekanisme pelayanan yang berjalan.
4. Efisiensi biaya tidak langsung, masyarakat dapat meminimalkan pengeluaran transportasi dan potensi kehilangan waktu kerja. Pelayanan yang lebih cepat dan dekat berdampak pada berkurangnya beban ekonomi, khususnya bagi warga yang bekerja harian atau memiliki keterbatasan finansial.

Dalam jangka panjang, kombinasi kemudahan akses, percepatan pelayanan, dan transparansi proses akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan lainnya. LOKER BERES dengan demikian tidak hanya meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Dampak bagi Disdukcapil dan Aparatur

Dari perspektif kelembagaan, implementasi LOKER BERES membawa perubahan struktural dalam pola kerja dan manajemen pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Transformasi ini tidak hanya berdampak pada distribusi pelayanan, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola internal.

1. Efisiensi operasional, beban pelayanan yang sebelumnya terkonsentrasi di kantor pusat kini terdistribusi secara lebih proporsional ke tingkat kelurahan. Desentralisasi ini mengurangi kepadatan pelayanan di front office utama dan menciptakan alur kerja yang lebih seimbang. Dengan beban yang lebih terdistribusi, potensi penumpukan berkas dapat diminimalkan dan waktu penyelesaian dokumen menjadi lebih terukur.
2. Digitalisasi proses pelayanan memungkinkan aparatur beralih dari pekerjaan administratif rutin menuju fungsi yang lebih strategis, seperti validasi data, pengawasan kualitas dokumen, serta pengendalian akurasi basis data kependudukan. Fokus kerja yang lebih substantif ini meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus memperkuat kualitas output pelayanan.
3. Penerapan sistem monitoring berbasis dashboard menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis dan berbasis data. Pimpinan dapat memantau jumlah permohonan, waktu penyelesaian, hingga kinerja tiap titik layanan secara real-time. Data pelayanan yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan dilakukan analisis tren, identifikasi hambatan operasional, serta perumusan langkah perbaikan secara cepat dan tepat.
4. Peningkatan kompetensi digital aparatur. Operator dan petugas dituntut untuk beradaptasi dengan sistem baru, sehingga tercipta budaya kerja yang lebih modern, responsif, dan berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, implementasi LOKER BERES memperkuat citra Disdukcapil sebagai institusi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memperkokoh kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola administrasi kependudukan secara profesional dan akuntabel.

Kontribusi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

LOKER BERES berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui, sebagai berikut :

- Penyediaan data kependudukan yang akurat dan real-time
- Dukungan terhadap perencanaan pembangunan berbasis data
- Peningkatan transparansi pelayanan
- Pengurangan potensi penyimpangan administratif

Data kependudukan yang valid menjadi dasar penting dalam kebijakan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan wilayah. Dengan demikian, LOKER BERES tidak hanya berdampak pada pelayanan adminduk, tetapi juga pada sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Strategi Implementasi dan Mitigasi Risiko

Implementasi LOKER BERES dilakukan melalui strategi terstruktur

1. Penyusunan SOP dan regulasi internal
2. Pelatihan operator kelurahan
3. Sosialisasi kepada masyarakat
4. Penguatan infrastruktur teknologi
5. Evaluasi dan monitoring berkala

Risiko seperti rendahnya literasi digital atau resistensi perubahan diantisipasi melalui pendekatan edukatif dan pendampingan teknis. Pendekatan bertahap memastikan sistem berjalan stabil sebelum diperluas secara menyeluruh.

Menuju Pelayanan Publik yang Berintegritas

LOKER BERES adalah wujud nyata komitmen reformasi birokrasi di Kota Bogor. Program ini tidak hanya berbicara tentang aplikasi atau teknologi, tetapi tentang perubahan budaya pelayanan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan dapat menjadi lebih Dekat, Cepat, Transparan, Efisien, Berintegritas

Melalui LOKER BERES, kita bergerak bersama menuju Kota Bogor yang lebih modern, mandiri, dan berdaya saing.



LAYANAN ONLINE KEPENDUDUKAN KELURAHAN

LOKER BERES

BERINTEGRITAS - EFEKTIF - RESPONSIF - EFISIEN - SEDERHANA

MEMBUKA LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN :

1 PEMUTAKHIRAN KARTU/KELUARGA

2 PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

3 PEMBUATAN AKTA KEMATIAN

4 PEMBUATAN SURAT PINDAH

5 PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK

6 PENGAJUAN JEMPOL BAHAGIA

SELURUH DOKUMEN KEPENDUDUKAN

GRATIS!

DAN TIDAK BERBAYAR DI DISDUKCAPIL KOTA BOGOR



Chat Sampurasun Dukcapil
0812 9000 3271

Web Portal Layanan Online
disdukcapil.kotabogor.go.id



PROGRESS REPORT

Mitra Pendamping Dinas Kesehatan

■ Penulis : Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



Foto Penyandang Disabilitas. (Sumber: canva.com)

Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 126 tahun 2022, memiliki tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja melaksanakan sebagai urusan pemerintahan dibidang Kesehatan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan pelayanan publik dan menjamin hak kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana amanat ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Cita ke Penyandang Disabilitas. Asta Cita yang ingin dicapai dari Bogor Sehat, yaitu Asta Cita 08. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya serta peningka-

tan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Salah satu Misi RPJPD Kota Bogor tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan adalah mewujudkan sumberdaya manusia yang tanggung dan berdaya saing ,meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif. Pemerintah Kota Bogor juga telah menetapkan Visi RPJMD 2025-2029 'Bogor Beres'. Visi tersebut diwujudkan melalui Misi 'Bogor Sehat' untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kebijakan ini akan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sejalan dengan Bogor Sehat □ meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (indeks kesehatan) □ umur harapan hidup, prevelansi stunting □ layanan khusus disabilitas dan lansia serta prioritas kepala daerah : pelayanan kesehatan prima □ memberikan fasilitas bantuan dan layanan khusus kelompok rentan (disabilitas dan lansia) dengan memberikan fasilitas dokter keliling

Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia, semua berhak mendapatkan pelayanan yang sama termasuk Penyandang Disabilitas (PD), seperti yang tercantum pada ratifikasi CPRD Tahun 2011. Pemerintah telah menetapkan standar pelayanan kesehatan inklusif melalui regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kota Bogor telah menunjukkan komitmen politik yang signifikan melalui penerbitan regulasi daerah. Pijakan hukum utama di Kota Bogor adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. PERDA ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih tinggi, seperti PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Hak Penyandang Disabilitas, serta PP Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

Salah satu permasalahan Pembangunan Kota Bogor adalah belum optimalnya perlindungan bagi kelompok rentan (ibu dan anak, lansia, Perempuan dan disabilitas). Pembahasan ini hanya akan berfokus pada layanan kesehatan disabilitas, yaitu layanan yang memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses perawatan kesehatan yang setara dan berkualitas. Layanan tersebut mencakup infrastruktur fisik yang ramah disabilitas, tenaga kesehatan yang terlatih dalam etika dan komunikasi, serta inovasi program untuk pemenuhan hak kesehatan disabilitas. Berikut data Penyandang Disabilitas Kota Bogor 2025 :

No	Disabilitas	Jumlah
1	Fisik	1.172
2	Intelektual	185
3	Mental	8.932
4	Sensorik Wicara	361
5	Sensorik Rungu	112
6	Sensorik Netra	232
Total		10.994

Permasalahan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, memiliki mandat vital untuk menjabarkan amanat undang-undang ini di level komunitas. Puskesmas tidak hanya berkewajiban memberikan layanan kuratif, tetapi juga promotif, preventif, dan rehabilitatif yang inklusif, memastikan bahwa penyandang disabilitas menerima layanan yang setara dan terintegrasi.

Namun keterbatasan anggaran dan SDM yang menangani penyandang disabilitas menyebabkan belum optimalnya pelayanan, adapun data sarana prasana disabilitas di puskesmas berdasarkan laporan Laporan Dinas Kesehatan tanggal 12 Januari 2026 tentang Umpan Balik Program Kesehatan Keluarga dan Disabilitas Tahun 2025 Capaian Indikator Program Kesehatan Penyandang Disabilitas Tahun 2025 baru mencapai 35 % dapat diakses pada link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10UI72GckhJHH5JGE0Tx0ENI3C2Hb6Px2nc089VIYP_4/edit?usp=drivesdk

Penyebab lain dari belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi disabilitas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kewajiban Akses dan Kesenjangan Implementasi

Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer memiliki tuntutan untuk dapat memberikan akses layanan yang setara dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Meskipun Kota Bogor telah menunjukkan komitmen dalam perencanaan pembangunan (seperti yang terlihat dalam dokumen Rencana Induk dan Peraturan Walikota), dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi layanan kesehatan inklusif di tingkat Puskesmas. Kesenjangan ini menimbulkan hambatan yang persisten bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan yang optimal.

2. Hambatan Utama Akses Layanan (Hambatan Fisik, Komunikasi, dan Perilaku)

Penyandang disabilitas di Kota Bogor, seperti di wilayah lain, menghadapi beragam hambatan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan secara penuh. Hambatan-hambatan utama ini meliputi:

- **Hambatan Fisik:** Keterbatasan aksesibilitas infrastruktur dan sarana di Puskesmas, seperti tidak tersedianya jalur landai (ramp), toilet yang aksesibel, atau fasilitas pemeriksaan yang tidak memadai untuk berbagai jenis disabilitas. Berdasarkan Laporan Umpan Balik Dinas Kesehatan Tanggal 12 Januari 2026, dari 25 Puskesmas, yang sudah maksimal baru 1 puskesmas (Puskesmas Tanah Sareal) sudah ada pemasangan guiding block dan sudah di assesment oleh Kemenkes dan Yayasan Difiable Action.
- **Hambatan Komunikasi:** Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam berkomunikasi dengan ragam disabilitas yang berbeda (misalnya, kurangnya keterampilan bahasa isyarat untuk penyandang tuli). Selain itu, media informasi kesehatan yang tersedia di Puskesmas sering kali belum dalam format yang dapat diakses oleh semua ragam disabilitas (misalnya, tidak ada format braille atau audio untuk tunanetra).
- **Hambatan Perilaku dan Stigma:** Masih adanya stigma, diskriminasi, dan persepsi negatif dari sebagian tenaga kesehatan atau masyarakat akibat kurangnya pemahaman mengenai kondisi disabilitas. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan kenyamanan penyandang disabilitas saat berinteraksi di fasilitas kesehatan.

3. Tantangan Internal di Puskesmas

Fasilitas Puskesmas dihadapkan pada tantangan internal yang spesifik dalam mewujudkan layanan inklusif, antara lain:

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):** Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas sering kali terbatas, bahkan ada yang harus menjalankan peran ganda (rangkap tugas). Keterbatasan ini memengaruhi waktu dan fokus yang dapat diberikan untuk melayani kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- **Keterbatasan Anggaran dan Ruangan:** Anggaran khusus untuk pengembangan layanan inklusif, seperti penambahan fasilitas aksesibel atau pelatihan komunikasi, masih terbatas. Selain itu, Puskesmas juga menghadapi kendala keterbatasan ruang dan lahan, yang menyulitkan upaya pengembangan unit pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penguatan layanan kesehatan inklusif dan ramah disabilitas di Puskesmas Kota Bogor sangat mendesak untuk memastikan hak kesehatan penyandang disabilitas terpenuhi, serta mengurangi risiko masalah kesehatan yang cenderung lebih tinggi pada kelompok rentan ini.

Fasilitas Disabilitas di Puskesmas Tanah Sareal.



Telah ada upaya dari Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan memperkuat komitmen di awal tahun 2024 melalui **Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor** yang secara spesifik menunjuk dan menginstruksikan adanya **Petugas Pendamping Prioritas Penyandang Disabilitas** di lingkungan Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas). Petugas ini memiliki tugas langsung untuk:

1. Menyediakan fasilitas ramah disabilitas sesuai kebutuhan.
2. Melayani penyandang disabilitas dengan ramah dan tanpa diskriminasi.
3. Mendampingi penyandang disabilitas ke tempat pelayanan.
4. Mengarahkan terhadap sarana dan prasarana ramah disabilitas yang tersedia.

Landasan hukum dan struktural yang kuat ini, baik di tingkat nasional maupun lokal, menjadi titik tolak untuk mengevaluasi implementasi di lapangan. Permasalahan utama dalam latar belakang ini bukanlah ketiadaan hukum, melainkan kesenjangan antara komitmen normatif dalam regulasi dengan realitas operasional layanan kesehatan di Puskesmas Kota Bogor.

Identifikasi Permasalahan Implementasi di Puskesmas Kota Bogor

Meskipun Kota Bogor memiliki PERDA dan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur layanan inklusif, pelaksanaan di lapangan, khususnya di Puskesmas masih menghadapi berbagai tantangan multidimensi. Permasalahan ini dapat dikategorikan menjadi hambatan fisik, non-fisik (komunikasi dan SDM), serta sistemik.

1. Hambatan Aksesibilitas Fisik (Infrastruktur)

Aksesibilitas fisik adalah syarat utama terwujudnya layanan kesehatan yang inklusif. Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Bogor secara jelas menguraikan persyaratan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, antara lain aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (seperti ramp atau jalur landai, jalur kursi roda, guiding block), kursi prioritas di ruang tunggu, dan toilet ramah disabilitas.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa:

- Kondisi Bangunan Lama dan Keterbatasan Lahan: Banyak gedung Puskesmas di Kota Bogor dibangun sebelum adanya standar aksesibilitas inklusif yang ketat. Upaya retrofitting (modifikasi bangunan lama) sering terkendala oleh keterbatasan anggaran, desain struktural asli, atau sempitnya lahan, sehingga penambahan fasilitas seperti ramp dengan kemiringan yang ideal atau perluasan pintu belum dapat dilakukan secara merata.
- Kualitas dan Ketersediaan Fasilitas: Meskipun ada beberapa Puskesmas yang telah berinisiatif, kualitas fasilitas yang tersedia seringkali belum memenuhi standar universal. Contohnya, ramp yang terlalu curam, tidak adanya pegangan tangan (handrail), guiding block yang terputus atau tidak terawat, serta toilet disabilitas yang terkadang digunakan sebagai gudang atau tidak dilengkapi dengan grab bar yang memadai. Kurangnya kursi prioritas yang terpisah dan terjamin haknya juga menjadi isu.
- Ketersediaan Peralatan Medis Aksesibel: Permasalahan tidak hanya terletak pada akses masuk, tetapi juga pada ruang pemeriksaan. Penyandang disabilitas motorik seringkali kesulitan menggunakan meja pemeriksaan atau timbangan yang standar. Ketiadaan peralatan medis yang dapat disesuaikan (adjustable) atau peralatan pemeriksaan khusus (misalnya timbangan kursi roda) memaksa penyandang disabilitas untuk diangkat atau diperiksa dalam posisi yang tidak nyaman, melanggar prinsip martabat dalam pelayanan.

2. Hambatan Aksesibilitas Non-Fisik (Sumber Daya Manusia dan Komunikasi)

Bahkan jika hambatan fisik telah teratasi, hambatan non-fisik yang berkaitan dengan interaksi manusia dan sistem seringkali menjadi masalah yang lebih pelik, meliputi:

- **Kompetensi dan Sensitivitas Tenaga Kesehatan**

Meskipun Dinas Kesehatan telah menunjuk Petugas Pendamping Prioritas, permasalahan terletak pada meratanya pemahaman dan keterampilan di seluruh staf Puskesmas.

Adapun data tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terkait pelayanan inklusif tersaji pada tabel berikut :

No.	Nama Puskesmas	Jumlah Nakes
1	Pkm Bogor Selatan	28
2	Pkm Pulo Armin	25
3	Pkm Tegal Gundil	28
4	Pkm Merdeka	37
5	Pkm Pondok Rumpit	22
6	Pkm Sempak	24
7	Pkm Gg Kelor	25
8	Pkm Warung Jambu	15
9	Pkm Mulyaharja	26
10	Pkm Gg Aut	4
11	Pkm Kayumanis	11
12	Pkm Cipaku	41
13	Pkm Kedung Badak	26
14	Pkm Sempur	25
15	Pkm Bogor Utara	17
16	Pkm Pancasan	31
17	Pkm Bondongan	10
18	Pkm Bogor Tengah	28
19	Pkm Pasir Mulya	4
20	Pkm Lw Gintung	24
21	Pkm Sindangbarang	10
22	Pkm Mekarwangi	4
23	Pkm Bogor Timur	39
24	Pkm Belong	5
25	Pkm Tanah sareal	22
Total		531

Tabel Data Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas MOOC per Januari 2026

Sebagian besar tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) belum menerima pelatihan yang komprehensif mengenai ragam disabilitas dan akomodasi yang layak. Hal ini mengakibatkan:

- Defisit Komunikasi: Tenaga kesehatan tidak terampil dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tuli (kurangnya kemampuan Bahasa Isyarat) atau penyandang disabilitas intelektual.
- Sikap dan Stigma: Minimnya pemahaman seringkali berujung pada sikap diskriminatif, baik yang disadari maupun tidak, seperti berbicara kepada pendamping alih-alih kepada penyandang disabilitasnya, atau menganggap disabilitas sebagai "penyakit" yang perlu "disembuhkan" alih-alih kondisi yang memerlukan dukungan.
- Diagnosis yang Buruk: Kurangnya pengetahuan tentang disabilitas dapat menyebabkan diagnostic overshadowing kondisi di mana gejala medis yang dialami penyandang disabilitas dianggap sebagai bagian dari disabilitasnya, sehingga mengabaikan penyakit lain yang sebenarnya diderita.

• Ketersediaan Informasi yang Aksesibel

Akses terhadap informasi merupakan hak. Di Puskesmas Kota Bogor, media informasi layanan, poster promosi kesehatan, atau alur pendaftaran masih didominasi format visual dan tekstual standar sehingga menyulitkan teman-teman disabilitas, sehingga menimbulkan permasalahan :

- Ketidadaan Format Alternatif: Informasi tidak tersedia dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra (Braille atau Audio) atau penyandang disabilitas intelektual/tuli (teks sederhana/visual bergambar). Hal ini menghalangi penyandang disabilitas untuk memahami hak mereka, alur pelayanan, atau edukasi penting terkait penyakit.

3. Permasalahan Sistemik dan Keberlanjutan

Di luar isu fisik dan SDM, Puskesmas Kota Bogor menghadapi tantangan sistemik untuk memastikan layanan inklusif bertahan lama:

- Integrasi ke dalam Indikator Kinerja: Kinerja Puskesmas diukur melalui akreditasi dan SPM. Agar layanan disabilitas menjadi prioritas, perlu adanya indikator pelayanan penyandang disabilitas yang spesifik dan dimasukkan dalam proses akreditasi fasilitas kesehatan. Jika indikator ini lemah atau tidak ada, Puskesmas cenderung memprioritaskan program lain yang memiliki indikator kinerja yang lebih jelas.
- Keterbatasan Anggaran Khusus: Ketersediaan anggaran khusus untuk pembangunan fisik inklusif dan pelatihan berkelanjutan bagi staf Puskesmas merupakan kendala nyata. Anggaran kesehatan seringkali terfokus pada program prioritas nasional (seperti pencegahan *stunting* atau TBC), dan alokasi dana untuk akomodasi layak bagi disabilitas sering kali dianggap sebagai biaya tambahan, bukan investasi hak.
- Mekanisme Pelaporan : Ketidadaan mekanisme yang efektif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas untuk melaporkan pengalaman buruk (diskriminasi, hambatan) di Puskesmas melemahkan upaya perbaikan.

Dampak Permasalahan Terhadap Kesehatan Warga Kota Bogor

Permasalahan implementasi layanan inklusif ini memiliki dampak serius, tidak hanya pada individu penyandang disabilitas, tetapi juga pada indeks kesehatan Kota Bogor secara keseluruhan.

1. Memperburuk Disparitas Kesehatan: Kesenjangan akses menyebabkan penyandang disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan sekunder, kondisi kesehatan yang tidak terdiagnosis, dan penurunan kualitas hidup.
2. Keterlambatan Intervensi Dini: Hambatan akses, terutama bagi disabilitas anak dan mental, menunda proses diagnosis dan intervensi dini. Hal ini menghambat peluang rehabilitasi dan rehabilitasi yang efektif, yang seharusnya menjadi bagian dari layanan Puskesmas sesuai PP 75/2020.

Rekomendasi

Dari data diatas dapat dianalisa, sudah dilakukan upaya oleh Dinas Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan disabilitas, hanya pelayanan yang diberikan belum optimal mengingat keterbatasan anggaran. Selain sarana prasarana fisik, dibutuhkan juga peningkatan SDM untuk pelayanan disabilitas, selain itu agar pelayanan kesehatan untuk disabilitas dapat dimasukkan dalam anggaran tersendiri, baik yang bersumber dari APBD maupun *creative financing*.

Adapun Rekomendasi dari hasil analisis tersebut adalah :

1. Penguatan alokasi anggaran (melalui APBD atau DAK)
2. Percepatan pemenuhan SDM Inklusif
3. Standarisasi ketersediaan informasi

Penguatan alokasi anggaran adalah **kunci untuk mengatasi hambatan sistemik dan non-sistemik secara fundamental**. Tanpa sumber daya yang memadai dan spesifik, komitmen kebijakan yang sudah tertuang dalam PERDA akan tetap menjadi komitmen normatif belaka, gagal diimplementasikan karena terbentur realitas operasional dan keuangan di tingkat Puskesmas.

Penutup

Dengan landasan hukum yang telah kuat (PERDA No. 2/2021 dan penunjukan Petugas Pendamping) dan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, fokus permasalahan bergeser dari ketiadaan kebijakan menjadi **kegagalan implementasi di tingkat Puskesmas**. Latar belakang ini akan menguraikan dan menganalisis secara mendalam berbagai dimensi hambatan—mulai dari infrastruktur, kompetensi SDM, hingga integrasi sistemik—untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menyebabkan layanan kesehatan disabilitas di Puskesmas Kota Bogor belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan prinsip hak asasi, keadilan, dan inklusivitas. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjembatani kesenjangan ini, mengubah komitmen menjadi aksi nyata.

Foto Penyandang Disabilitas. (Sumber: canva.com)





DI NU KIWARI NGANGCIK NU BIHARI SEJA AYEUNA SAMPEUN JAGA

Ayo Ikuti dan Menangkan BOGOR INNOVATION AWARD 2026

INOVASI
UNTUK
BOGOR
YANG LEBIH
MAJU!

"SPARK YOUR IDEA"

Innovation and Collaboration
Empowering the Future



KATEGORI PESERTA



PELAJAR SMP/SMA
MAHASISWA



MASYARAKAT



PERANGKAT DAERAH
ASN KOTA BOGOR



PELAKU USAHA
KOMUNITAS



BIDANG LOMBA



LINGKUNGAN
HIDUP



PANGAN &
AGROBISNIS



TEKNOLOGI
INFORMASI &
KOMUNIKASI



AIR, MINUM &
KEBERSIHAN



TRANSPORTASI
RAMAH
LINGKUNGAN



KEAMANAN
& HUKUM TATA
NEGARA



SOSIAL



EKONOMI
KREATIF



KESEHATAN
OBAT-OBATAN



TOTAL HADIAH

- ✓ Uang, sertifikat, dan penghargaan
- ✓ Drahsilitasi sertifikasi HKI
- ✓ Siap dimkubasi menjadi inovasi Kota Bogor
- ✓ Fasilitas Bimtek Student Entrepreneur Project (STEP) untuk pemenang kategori Pelajar



TAHAPAN PELAKSANA



TOTAL HADIAH

126.000.000

SERTIFIKAT - TROFI - UANG

DAFTAR SEKARANG !!!

Kunjungi dan daftar melalui



<https://bia.kotabogor.go.id>



SCAN ME!



@bapperidakotabogor



@bapperidakotabogor



@bapperidakotabogor



www.bapperida.kotabogor.go.id

JUARA 1

Pengertian

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(UU No.14 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 2)

Tahukah Kamu ???

Setiap tahun, Komisi Informasi Pusat mengadakan penilaian & pemberian penghargaan kepada badan publik yang paling informatif. Hal ini mendorong badan publik semakin transparan kepada masyarakat loh!

Informasi Publik

Kategori Informasi Publik

Secara substansi, kategori informasi publik yang dimiliki badan publik dan diatur UU No.14 Tahun 2008 meliputi:

1

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala



2

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara Serta Merta



3

Informasi Publik yang wajib tersedia Setiap Saat



4

Informasi Publik yang Dikecualikan



DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008**
tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010**
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Komisi Informasi No. 1 / 2021**
tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017**
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.
- 5 Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2022**
tentang standar layanan informasi publik

Standar Pelayanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi

PERSYARATAN PELAYANAN

- 1** Pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web **ppidkotabogor.go.id**.
- 2** Persyaratan administrasi: menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan; atau;
- 3** Menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga



Prosedur Pelayanan

Sistematika prosedur pelayanan:

1

Pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui situs web bapperida.kotabogor.go.id/permohonan-informasi



2

Petugas pelayanan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID



3

Ditanggapi permohonan informasi 10 hari + 7 hari kerja

Pemohon mengajukan berkas yang akan diverifikasi oleh petugas PPID. Setelah verifikasi, data yang dibutuhkan dicari dan diolah untuk kemudian disusun menjadi jawaban. Surat jawaban diserahkan paling lambat 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja jika PPID belum menguasai informasi yang diminta.



BIAYA

GRATIS

Tanpa dipungut Biaya



WAKTU PELAYANAN

Senin–Kamis
07.30 - 15.30 WIB

Istirahat
12.00 - 13.00 WIB

Khusus Jumat
07.30 - 16.00 WIB

Istirahat
11.30 - 13.00 WIB



JAMINAN PELAYANAN

Terlayannya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008



www.bapperida.kotabogor.go.id



@bapperida.kotabogor

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Prosedur Pelayanan Informasi Publik



LAYANAN PERMOHONAN **DATA & INFORMASI** ke Bapperida Kota Bogor

SCAN DISINI



<https://bit.ly/req-data-bapperida>



**DATA
AKURAT**

Sumber resmi
dan terpercaya



**PELAYANAN
MUDAH**

Proses cepat
dan transparan



**AMAN &
TERJAMIN**

Data terjaga
kerahasiaannya



**LAYANAN
RESPONSIF**

Siap melayani
kebutuhan Anda



www.bapperida.kotabogor.go.id



[@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

BAPPERIDA KOTA BOGOR

— TRIWULAN I TAHUN 2026 —

96,45

**PREDIKAT
“SANGAT BAIK”**

**NO
CORRUPTION**

**STOP
CORRUPTION**



INTEGRITAS

Menjunjung tinggi kejujuran dan etika.



TRANSPARAN

Terbuka dalam setiap proses dan informasi.



AKUNTABEL

Bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan.



MELAYANI

Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.



www.bapperida.kotabogor.go.id



@bapperida.kotabogor.

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

BAPPERIDA KOTA BOGOR

— TRIWULAN I TAHUN 2026 —

PREDIKAT

“SANGAT BAIK”

HASIL SPAK



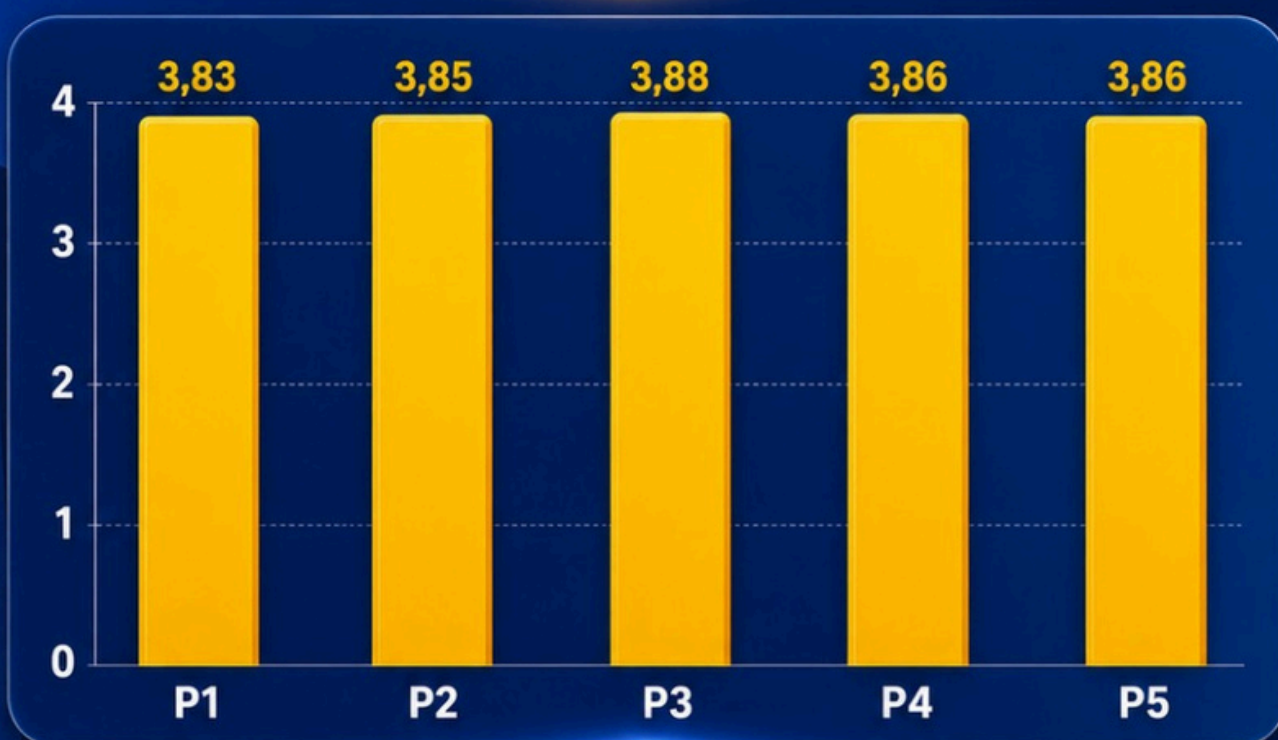
INDEKS SPAK



**JUMLAH
RESPONDEN**

148

HASIL INDEKS PER-INDIKATOR PENILAIAN SPAK BAPPERIDA



P1 : Ada/Tidaknya Diskriminasi Layanan

P2 : Ada/Tidaknya Layanan Diluar Prosedur

P3 : Ada/Tidaknya Imbalan Uang/Barang/Fasilitas di Luar Ketentuan

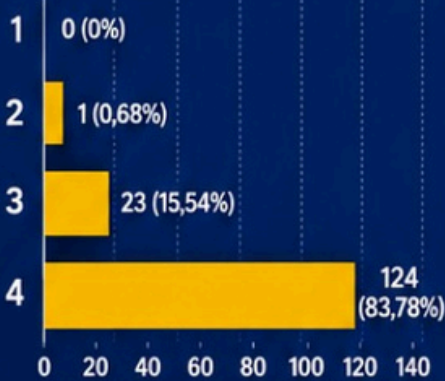
P4 : Ada/Tidaknya Pungutan Liar

P5 : Ada/Tidaknya Percaloan

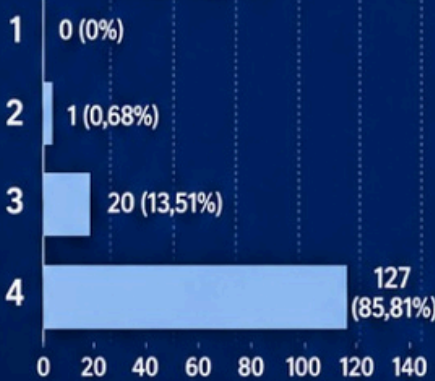
DETAIL HASIL INDEKS PER-INDIKATOR SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI



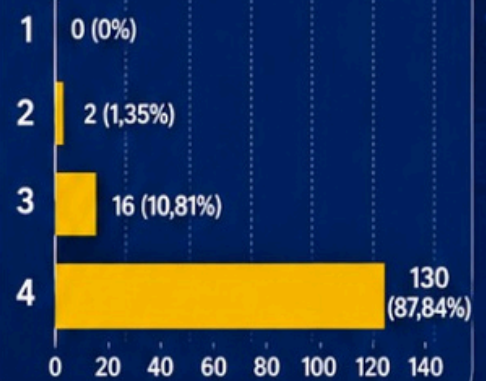
ADA/TIDAKNYA DISKRIMINASI LAYANAN



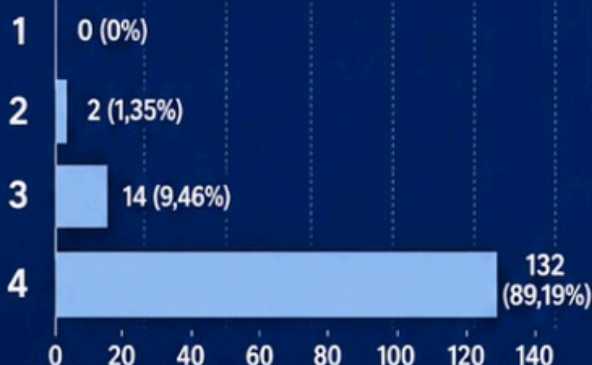
ADA/TIDAKNYA LAYANAN DILUAR PROSEDUR



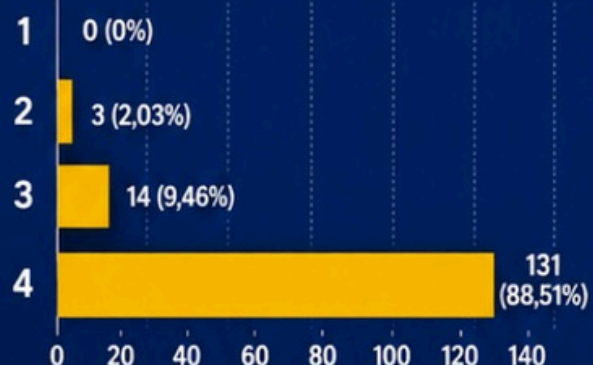
ADA/TIDAKNYA PUNGUTAN LIAR



ADA/TIDAKNYA IMBALAN UANG/BARANG/FASILITAS DI LUAR KETENTUAN



ADA/TIDAKNYA PERCALOAN



*Bobot : 1 - 4



*Jumlah Responden :
148 Orang

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT ke Bapperida Kota Bogor

SCAN DISINI



<https://bit.ly/pengaduan-bapperida>



RESPON CEPAT

Setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat



MUDAH & PRAKTIS

Sampaikan laporan kapan saja dan di mana saja



DATA AMAN & TERJAMIN

Kerahasiaan data pelapor selalu terjaga



BOGOR LEBIH BAIK

Partisipasi Anda mewujudkan Bogor yang maju



www.bapperida.kotabogor.go.id



@bapperida.kotabogor

”

**Data yang
akurat hari ini
adalah jaminan
layanan yang
lancar esok hari**

WARDHANI, S.P., M.P. - DISDUKCAPIL KOTA BOGOR



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telepon: (0251) 8338052 | Website: <http://bapperida.kotabogor.go.id> | Email: bapperida@kotabogor.go.id | Instagram: [@bapperida.kotabogor](https://www.instagram.com/bapperida.kotabogor)